



Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM Menyongsong akhir Decade of ESD (2005 – 2014)

Oleh
Kelompok Kerja LSM untuk PPB Indonesia

Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM Menyongsong akhir Decade of ESD (2005 – 2014)

Oleh

Kelompok Kerja LSM untuk PPB Indonesia

Penyusun

Mohammad Saleb– BioComm, Bandung
Maria Mumpuni Purboningrum - Benih Matahari, Malang
Retno Setyaningrum - WWF Indonesia, Jakarta
Rina Kusuma– KEHATI, Jakarta
Rini R. Adriani - WWF Indonesia, Jakarta
Stien J. Matakupan – Fakultas Pendidikan-USBI, Jakarta

Kontributor

Amalia Hamidi, Bogor
Agus Sugito - HIJAU GPL, Yogyakarta
Diab R. Sulistiowati - WWF Indonesia, Jakarta
Dian Mubammad Tasrif - PPLH Puntondo, Takalar
Edy Juspar– STB, Makassar
Herni Frilia Hastuti - PPLH Bali, Denpasar
Indra Hatasura– RMI, Bogor
Mardiko Saputro – WYDII, Surabaya
Mubammad Adi Prasetyo - K.A.K, Pontianak
Novita - WWF Indonesia, Jakarta
Qodirul Aini– PWEC, Malang

Editor:

Israr Ardiansyah

Disain & Tata Letak

Bambang Parlupi

Daftar Akronim

BLH	Badan Lingkungan Hidup
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DPPB	<i>The United Nations Decade of Education for Sustainable Development</i> , dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB
PPB	Education for Sustainable Development (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai PPB= Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan)
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> , diskusi terarah berkelompok
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus infection/Acquired Immune Deficiency Syndrome, sindrom/</i> penyakit rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV
ICT	Information and Communications Technology, diterjemahkan sebagai Teknologi Komunikasi dan Informasi
KKG	Kelompok Kerja Guru
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPMP	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat, istilah yang digunakan di Indonesia untuk NGO (<i>Non Governmental Organization</i>)
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
NGO	Non-governmental organization
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa, istilah yang digunakan di Indonesia untuk <i>United Nations</i>
Perda	Peraturan Daerah
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKLH	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
PLH	Pendidikan Lingkungan Hidup
PPB	Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
PusLitJakNov	Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi pada Kementerian
Kemendikbud	Pendidikan dan Kebudayaan
Pu3PB	Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan
P4TK	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
REDD	<i>Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries</i> , pengurangan emisi karbon dioksida akibat penggundulan
Renstra	Rencana Strategis
RPJPN	Rencana Pendidikan Jangka Panjang Nasional
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
SBL	Sekolah Berwawasan Lingkungan
UNESCO	<i>United Nations Education, Scientific and Cultural Organization</i> ,
UU	organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB
UUD	Undang Undang Undang Undang Dasar

Daftar Isi

Daftar Akronim		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Di Balik Laporan “ Perjalanan <i>Education for Sustainable Development</i> di Indonesia dalam Perspektif LSM “		1
BAB I	Pendahuluan	6
BAB II	Dasar Hukum PPB di Indonesia	11
BAB III	Satus Implementasi PPB di Beberapa Wilayah di Indonesia	13
BAB IV	Capaian dan Petik Pembelajaran	26
BAB V	Kesimpulan Umum dan Rekomendasi	28
Referensi		30
Lampiran		
1.	Dasar Hukum PPB	31
2.	Payung Hukum PPB	33
3.	Pendamping Sekolah di Indonesia	37
4.	Kegiatan PPB oleh Beberapa LSM	38
5.	Kompilasi Data Kegiatan Analisa NatRep ESD-LSM	39
6.	Profil Lembaga Anggota Kelompok Kerja LSM untuk ESD di Indonesia	41

Daftar Tabel

Tabel 1	Sistem Pendidikan Indonesia
Tabel 2	Hasil Skor Indonesia dalam PISA tahun 2010-2012
Tabel 3	Tema Aksi Kunci DPPB/ <i>DPPB Key Action Themes</i>
Tabel 4	Isu utama PPB di Asia Pasifik
Tabel 5	Contoh Matriks Isian Indikator Pencapaian PPB
Tabel 6	Delapan Indikator Pencapaian Program PPB
Tabel 7	Status Implementasi dan Kajian Kebijakan PPB di Indonesia
Tabel 8	Status Implementasi dan Kajian Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia
Tabel 9	Status Implementasi dan Kajian Peningkatan Kapasitas PPB di Indonesia
Tabel 10	Status Implementasi dan Kajian Peran Sektor Swasta, Kemitraan dan Donor dalam PPB di Indonesia
Tabel 11	Status Implementasi dan Kajian Sistem Informasi dan Publikasi PPB di Indonesia
Tabel 12	Status Implementasi dan Kajian Jejaring PPB di Indonesia
Tabel 13	Capaian dan Petik Pembelajaran

Di Balik Laporan “Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM”

Republik Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dengan penduduk sebanyak 235 juta (2013). Luas wilayahnya yang mencakup daratan dan lautan juga menempatkannya dalam 20 negara terbesar di dunia.

Bentang alam Indonesia yang terdiri dari laut, pulau, kepulauan dan pegunungan, dalam proses pembangunan dan pengembangannya dari masa ke masa menghasilkan banyak dampak. Dampak tersebut ada yang positif namun ada pula yang memberi dampak kesenjangan kehidupan di sebagian besar masyarakat. Kondisi inilah yang memberi ruang bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah (Ornop) untuk berperan pada pergerakan di tingkat akar rumput untuk dan dari masyarakat dalam rangka mencapai penghidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam perjalanannya yang cukup panjang, sejumlah LSM di beberapa daerah menjalin kemitraan dengan pemerintah di daerah masing-masing maupun pihak terkait lainnya. Secara umum dapat dikatakan keberadaan LSM di masyarakat maupun pemerintah diterima dan diakui memberikan hasil dan dampak positif.

Dalam pengembangan dan penerapan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (PPB) atau juga dikenal dengan istilah aslinya *Education for Sustainable Development* (ESD), sejumlah pemangku kepentingan termasuk organisasi sipil/lembaga swadaya masyarakat juga ikut berperan penting.

Menjelang berakhirnya Dekade PPB (2005 – 2014) sebagaimana dicanangkan UNESCO hampir sepuluh tahun lalu, sejumlah penggerak PPB/aktivis LSM tergerak untuk melihat sejauh mana PPB dikenal, dipahami, dan dilaksanakan di Indonesia. Perjalanan program PPB di Indonesia dan pendampingan oleh LSM tersebut perlu direkam dan didokumentasikan sebagai bahan masukan dan pembelajaran bersama. Hal tersebut mendorong pembuatan “Perjalanan *Education for Sustainable Development* di Indonesia dalam Perspektif LSM” ini. Laporan ini dimaksudkan sebagai pendukung informasi penerapan PPB dalam berbagai bentuk dan penerjemahan di tingkat lapangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Untuk mengumpulkan data pendukung pembuatan laporan ini, pada semester kedua tahun 2012, beberapa LSM melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di tujuh kota lokasi dengan mitra program yang terdiri dari guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan kota atau kabupaten, BLH, serta LSM lain. Di tingkat nasional, pada bulan Desember 2012 Jaringan PPB Indonesia dan WWF Indonesia mengadakan Lokakarya Kebijakan PPB yang dihadiri 150 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat hingga daerah, kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah, dan sejumlah mitra program. Lokakarya Kebijakan PPB tersebut menjadi titik awal terbentuknya Kelompok Kerja: Sosialisasi Rekomendasi Hasil Lokakarya Kebijakan PPB dan pembuatan laporan “Perjalanan *Education for Sustainable Development* di Indonesia dalam Perspektif LSM”

Kelompok Kerja yang terdiri dari 12 LSM tersebut terbagi atas : 1) Simpul Wilayah, yang dibentuk agar penggalian informasi dapat menjangkau hampir menyeluruh daerah di Indonesia; dan 2) Tim penyusun yang bertanggung jawab menyusun dan memberikan dasar teori dan pemikiran pada beragam informasi penerapan PPB di berbagai daerah di Indonesia.

Kerangka laporan nasional ini disusun secara bersama-sama antara Simpul Wilayah dan Tim Penyusun, yang kemudian dipresentasikan kepada pihak-pihak terkait PPB di tingkat Pusat, para penyumbang informasi, dan perwakilan LSM dari beberapa lokasi selain simpul Wilayah. Hal ini sangat penting sebagai tahap terakhir penyelesaian laporan nasional PPB versi NGO.

Status implementasi dan kajian PPB dalam laporan ini didapat berdasarkan pengumpulan praktek-praktek pelaksanaan PPB (*best practice*) dari 22 NGO di 11 daerah/provinsi di Indonesia. Harus diakui, pengumpulan data dalam waktu dan sumber daya manusia terbatas ini tidak bisa mewakili Indonesia secara utuh. Meskipun begitu, diharapkan data yang terkumpul ini bisa memberikan gambaran besar tentang pelaksanaan PPB di Indonesia. Penyusunan laporan ini memberikan sumbangan kerangka keberlanjutan dari sudut pandang dan perspektif pelaku di tingkat akar rumput di beberapa wilayah di Indonesia.

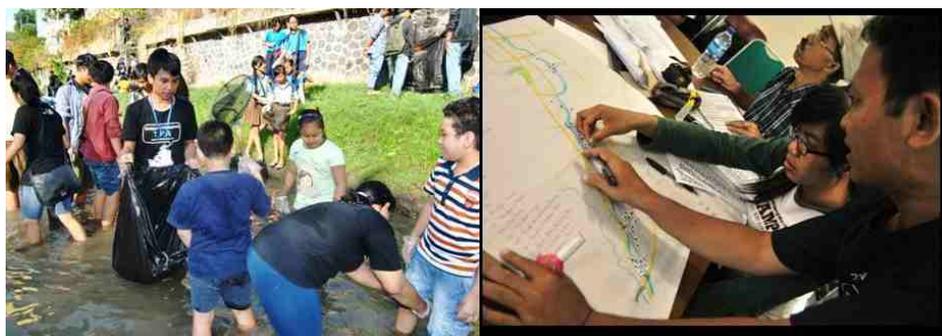


Foto : Dokumentasi PPLH Bali

Indonesia dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan Undang – Undang (UU). Lebih lanjut, UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah menetapkan wajib belajar sembilan tahun.

Penetapan wajib belajar memberikan dampak positif pada angka partisipasi sekolah di Indonesia yaitu meningkat dari 94,06 % di tahun 1994 menjadi 97,88% di tahun 2012 untuk anak usia 7-12 tahun. Untuk anak usia 13-15 tahun, persentasi juga meningkat dari 72,39% di tahun 1994, menjadi 89,52% di tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2014). Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan Indonesia melalui struktur sebagaimana pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Sistem Pendidikan di Indonesia

Usia	Pendidikan Sekolah	Pendidikan Luar Sekolah	
		Formal	Non Formal
0 - 3			Pendidikan Keluarga dan Lingkungan
4 - 6	Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat	Kelompok Bermain (KB); Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat	
7 - 12	Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat	Pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk m e n g e m b a n g k a n kemampuan peserta didik.	
13 - 15	Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat		
16 - 18	Pendidikan Menengah Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.		
≥19	Pendidikan Tinggi Peguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas		
	Pendidikan Kegamaan	Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.	
	Pendidikan Jarak Jauh		
	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus		
	Pendidikan Kedinasan		

Dengan jumlah populasi penduduk yang besar dan negara kepulauan yang luas, maka ada berbagai kendala yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu kendala tersebut adalah kualitas guru dan tenaga pengajar. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, jumlah guru yang berperan dalam proses pendidikan formal adalah hampir 2,92 juta orang. Dari jumlah tersebut, hasil sensus penduduk tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 36 persen guru yang memiliki ijazah S1, sementara 26 persen adalah lulusan sekolah menengah atas atau bahkan kurang dari itu. Pengetahuan, kemampuan pedagogi, dan pengetahuan akademis guru Indonesia juga menjadi perhatian serius pemerintah saat ini.

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang kompetensi guru Indonesia, maka pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan test kompetensi untuk guru SD dan SMP. Hasil studi menunjukkan presentase rata-rata jawaban yang benar untuk guru sekolah dasar adalah 38 persen, sementara rata-rata yang dicapai guru sekolah menengah, dari dua belas mata pelajaran yang diujikan adalah hanya 45 persen, dengan rata-rata nilai Fisika, Matematika, dan Ekonomi adalah 36% atau kurang (*The World Bank Office Jakarta*, 2010).

Selain itu hasil studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang dikenal dengan nama PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang dikoordinasikan oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) yang berkedudukan di Paris, Perancis juga menunjukkan bahwa hasil yang dicapai siswa Indonesia masih di bawah rata-rata. Tes tersebut mengukur kecakapan siswa dalam mengimplementasikan masalah-masalah di kehidupan nyata. Indonesia mengikuti tes ini sejak tahun 2000 (lihat tabel Skor Indonesia dalam Tes PISA). Bila dibandingkan dengan hasil dari negara lain, dari tahun ke tahun skor Indonesia selalu di bawah rata-rata skor internasional (500). Pada tes tahun 2012, Indonesia menempati ranking 64 dari 65 negara peserta, sedikit lebih baik daripada Peru dan jauh dibawah negara tetangga Malaysia (52) , Thailand (50), Vietnam (17), Singapore (2).

Tabel 2. Hasil Skor Indonesia dalam PISA tahun 2000-2012

Skor prestasi dalam bidang/tahun	2000	2003	2006	2012
Literasi Membaca	371	382	393	396
Literasi Matematika	367	360	391	375
Literasi Sains	393	395	393	382

Kemampuan literasi dasar siswa Indonesia menurut hasil penelitian Hanushek dan Wößman yang dikutip oleh World Bank Jakarta (2010) menunjukkan bahwa diantara siswa yang sudah lulus kelas 9 (atau kelas 3 Sekolah Menengah Pertama) yang merupakan kelas terakhir dari program wajib belajar 9 tahun, hanya 46% yang memiliki kemampuan literasi yang baik (World Bank, 2010)

Dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menyelaraskan proses pendidikan dengan dinamika perkembangan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global serta mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pada tahun 2013, pemerintah melakukan revisi kurikulum pendidikan nasional dengan secara resmi memberlakukan kurikulum 2013 melalui Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam hal peningkatan kualitas guru, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan UU No 14 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru dan dosen adalah pendidik profesional yang dibuktikan dengan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D IV). Sementara sertifikat pendidik dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan: (1) minimum sarjana S1; (2) Mengikuti pelatihan peningkatan profesi; dan (3) Mengajar minimum dua puluh empat jam/minggu. Melalui program sertifikasi ini, diharapkan pada tahun 2015 hanya guru yang bersertifikat yang dapat mengajar di Indonesia.



Foto : Dokumentasi Lembaga JARI – Juang Laut Lestari



Foto : Dokumentasi YAPEKA

Pada pasal 36 Agenda 21 tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Inilah awal perumusan konsep pendidikan dalam rangka mendukung upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*) merupakan konsep dinamis yang memberikan arah pada visi baru dunia pendidikan, yang memberdayakan masyarakat dari berbagai kelompok umur untuk turut bertanggung jawab dalam mewujudkan dan menikmati masa depan berkelanjutan.

Pada tanggal 20 Desember 2002, majelis umum PBB melahirkan suatu konsensus yang menetapkan 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan menetapkan UNESCO sebagai lembaga PBB yang memimpin promosi dekade dan berperan penting dalam implementasi PPB. Implementasi PPB membutuhkan kerjasama antar pemerintah, akademisi, masyarakat ilmiah, guru, LSM, masyarakat lokal dan media untuk mereorientasi pendidikan demi terwujudnya kepedulian bahwa kita semua memiliki takdir yang sama, dan berkomitmen untuk masa depan yang lebih baik bagi umat manusia dan planet ini.

Pada pencaanangan Dekade PPB oleh UNESCO, ada delapan (8) tema aksi (*DESD Key Action Themes*) (lihat Tabel 3 yang berisikan penjelasan singkat)

Tabel 3. Delapan Tema Aksi Kunci Dekade PPB/*DESD Key Action Themes*

<i>Key Action Themes</i>	Penjelasan
<i>Gender Equality</i>	Kesetaraan gender
<i>Health Promotion</i>	Memajukan kesehatan
<i>Environment</i>	Lingkungan
<i>Rural Development</i>	Pembangunan pedesaan
<i>Cultural Diversity</i>	Keragaman budaya
<i>Peace and Human Security</i>	Perdamaian dan keamanan umat manusia
<i>Sustainable Urbanization</i>	Urbanisasi menerapkan prinsip kelestarian
<i>Sustainable Consumption</i>	Konsumsi menerapkan prinsip kelestarian

Dalam penyusunan Laporan Nasional ini, ada 11 isu utama yang dikaji sebagai acuan untuk pemetaan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan Dekade PPB di Indonesia, mengacu pada UNESCO *Asia and Pacific Regional Bureau for Education* (2005). Sebelas isu tersebut bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Isu Utama Dekade PPB di Asia Pasifik

ESDCore Issues in Asia Pacific	Penjelasan
<i>Information and Awareness (e.g. ecomedia, media literacy, ICT)</i>	Informasi dan kesadartahuan (mencakup media, serta teknologi komunikasi dan informasi)
<i>Knowledge Systems (e.g. learning for local and indigenous knowledge, integrating traditional and modern technologies)</i>	Sistem pengetahuan: belajar dari kearifan lokal (antara lain integrasi teknologi modern dan tradisional)
<i>Environmental Protection and Management (e.g. biodiversity, climate change, natural resources, conservation)</i>	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan (mencakup keanekaragaman hayati, perubahan iklim, sumber daya alam dan konservasi)
<i>Peace and Equity (e.g. conflict resolution, peace, equity, appropriate development, democracy)</i>	Perdamaian dan kesetaraan (mencakup antara lain: resolusi konflik, perdamaian, kesetaraan, pembangunan yang tepat, demokrasi)
<i>Local Context (e.g. community development, empowerment)</i>	Konteks lokal (antara lain: pengembangan dan pemberdayaan masyarakat)
<i>Transformation (e.g. rural transformation, urbanization, sustainable habitat, water, sanitation, public infrastructure)</i>	Transformasi (antara lain: transformasi daerah perkotaan, urbanisasi, habitat yang berkelanjutan, air, sanitasi, infrastruktur umum)
<i>Culture (e.g. diversity and intercultural/ interfaith understanding)</i>	Budaya (antara lain: keanekaragaman, pemahaman lintas budaya/lintas agama atau keimanan)
<i>Cross-cutting Issues and Themes (e.g. human rights, citizenship, gender equality, sustainable futures, holistic approaches, innovation, partnerships, sustainable production & consumption, governance)</i>	Isu dan tema lintas bidang (antara lain: Hak Asasi Manusia/HAM, kewarganegaraan, kesetaraan gender, pendekatan menyeluruh, inovasi, kemitraan, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, tata kelola.
<i>Health (e.g. HIV/ AIDS, malaria)</i>	Kesehatan (antara lain: HIV/ AIDS, malaria)
<i>Environmental Education (e.g. integrated pest management, environmental awareness, community recycling programmes)</i>	Pendidikan lingkungan (antara lain: kepedulian lingkungan, program daur ulang berbasis komunitas, manajemen pengendalian hama yang terintegrasi)
<i>Engagement of Leaders (e.g. professional training courses, executive education, partnerships, networking)</i>	Membangun kerjasama dengan para pemimpin (antara lain: Kursus pengembangan profesi, pendidikan eksekutif, kemitraan, jejaring)

(Sumber: Core PPB Issues in the Asia-Pacific (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2005b, p. 4).

Di Indonesia pengembangan PPB dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan interpretasi terhadap konsep dan arah yang digariskan UNESCO. Hingga saat ini, belum dihasilkan sebuah konsep khusus yang disusun oleh berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama terkait pengembangan PPB di Indonesia.

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjaknov) Kemdikbud pada tahun 2009 menghasilkan Panduan PPB untuk Pendidikan. Sejumlah sekolah model dilibatkan dalam proyek percontohan tersebut. Meskipun begitu, berdasarkan pengalaman sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampingi sejumlah sekolah di berbagai wilayah di Indonesia, sosialisasi panduan dari pihak berwenang dirasakan sangat minim. Bahkan di beberapa daerah, sejumlah pejabat terkait masih terlihat belum menguasai konsep pembangunan berkelanjutan dan juga PPB.

Sejarah Perkembangan Pendidikan Lingkungan dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PPB di Indonesia

Di Indonesia, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) mulai bergaung secara resmi di tingkat nasional sekitar tahun 1987. Pada saat itu, PLH dilaksanakan di sekolah dalam materi pembelajaran PKLH (Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup). Dalam berjalannya waktu, materi pembelajaran ini pun tidak ada lagi di dalam kurikulum.

Pada saat PLH digaungkan lagi oleh beberapa LSM di beberapa daerah sekitar tahun 1990, pihak sekolah maupun pihak pemerintahan mengingat kembali program PKLH tersebut. PLH berdinamika di luar jalur kurikulum pendidikan di sekolah. Sekolah berkegiatan PLH dengan LSM baik di ekstra kurikuler maupun kegiatan lapangan sebagai pelengkap proses belajar mengajar di sekolah, serta berkembang kegiatan pelatihan dan lokakarya untuk guru baik bersifat lokal maupun nasional.

Kegiatan guru terkait PLH sebagian besar atau bahkan semuanya dikelola oleh LSM, karena PLH masih belum cukup dikenal di pemerintahan baik dari pusat hingga daerah. Sementara itu, kelompok-kelompok siswa berkegiatan terkait pendidikan lingkungan menjamur dan didampingi oleh LSM. Beberapa kegiatan antara lain pemantauan sungai, pengelolaan lahan kosong, beragam penelitian sederhana tingkat siswa. Beberapa proyek siswa diangkat hingga tingkat internasional.

Kegiatan guru terkait PLH sebagian besar atau bahkan semuanya dikelola oleh LSM, karena PLH masih belum cukup dikenal di pemerintahan baik dari pusat hingga daerah. Sementara itu, kelompok-kelompok siswa berkegiatan terkait pendidikan lingkungan menjamur dan didampingi oleh LSM. Beberapa kegiatan antara lain pemantauan sungai, pengelolaan lahan kosong, beragam penelitian sederhana tingkat siswa. Beberapa proyek siswa diangkat hingga tingkat internasional.

Dinamika PLH semakin tinggi pada saat dibentuknya Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) pada November 1997 (pertemuan di Situ Gunung, Jawa Barat), dengan LSM sebagai inisiator utama. Pembentukan jaringan itu disebabkan pemahaman adanya kebutuhan yang berbeda-beda di antara masing-masing pelaku PLH. Perbedaan kebutuhan itu terkait luasnya dan beragamnya masyarakat Indonesia. Perkembangan masyarakat di setiap memiliki berbagai perbedaan. Sementara, infrastruktur tiap daerah pun jauh berbeda.

Pergerakan yang didorong oleh JPL berbuah konsep Sekolah Berwawasan Lingkungan (SBL) yang kemudian dipayungi oleh KLH sejak tahun 2006 dan berkembang hingga sekarang sebagai program nasional resmi dari pemerintah. Program tersebut memilih sejumlah sekolah di berbagai penjuru tanah air untuk dijadikan percontohan dan mendapat predikat/penghargaan “Sekolah Adiwiyata”.

Terlepas pemahaman dan penerapan PLH yang beragam di berbagai wilayah pada program Adiwiyata tersebut, program tersebut membuat PLH menjadi suatu yang menarik dan dicari oleh sekolah. Program ini pula yang membuat harmonis hubungan antara LSM dan Pemerintah di pusat sampai di tingkat daerah, dan mendorong kerjasama antar instansi pemerintahan terkait di daerah.

Pada saat di Indonesia PLH menjadi favorit, sebenarnya di tingkat internasional PPB sudah terimplementasi di sekolah beberapa negara sejak akhir tahun 1990-an. Walaupun telah terencanakan Dekade PPB di tahun 2005, bahkan pemerintah membuat MoU di tahun 2005 dan diperbaharui di tahun 2010, PPB belum juga dikenal secara umum di Indonesia. Hanya beberapa LSM, yang kemudian bergerak bersifat lokal untuk menerapkan PPB dalam berbagai bentuk berdasarkan prinsip utama PPB. Namun, integrasi atau saling keterkaitan sebagai prinsip utama PPB menjadi tantangan besar karena proses integrasi masih merupakan hal yang jarang sekali dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Akibatnya, penerapan PPB masih memerlukan waktu lebih.



Foto : Dokumentasi Yayasan Kanopi Indonesia - Yogyakarta



Foto : Dokumentasi GPL Hijau- Yogyakarta

Bab II. Dasar Hukum PPB

PPB bukanlah sesuatu yang baru dan tiba-tiba muncul di Indonesia. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan PPB dalam peraturan perundangan, namun nilai-nilai PBB telah terlihat diakomodasi dalam berbagai peraturan perundangan. Bagian dari tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana 6 dasar pijakan PPB terintegrasi dalam berbagai peraturan perundangan. Enam dasar pijakan PBB adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran seumur hidup
2. Fokus pada pembelajar
3. Pendekatan holistik
4. Beragam metode kerja demokratis
5. Berfikir mendalam
6. Beragam perspektif yang berbeda

Berbagai peraturan perundangan telah mengintegrasikan 6 dasar pijakan PBB, baik peraturan pada tingkat Undang-undang Dasar, Undang-undang hingga berupa nota kesepahaman dari beberapa kementerian. Sebagai aturan pelaksana dari undang-undang, 6 dasar pijakan PBB ini juga terintegrasi dalam beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pendidikan. Undang-undang Dasar 1945 memberikan mandat untuk pelaksanaan PPB berdasar Pasal 31 ayat (3) yang mengamanatkan:

“ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Amanat ini yang kemudian dilaksanakan tidak hanya oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun juga oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Dengan diurnya PPB dalam peraturan perundangan selain Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa PPB tidak hanya menjadi bagian sistem pendidikan nasional semata, namun juga telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Lebih tegas lagi terlihat bahwa PPB menjadi hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹Lihat Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4)

Pemerintah kemudian menurunkan mandat ini dalam beberapa aturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, serta Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No 03/MENLH/02/2010 dan No 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. Pengaturan PBB dalam berbagai peraturan ini dapat dilihat dalam Lampiran 1.



Foto : Dokumentasi STB (Sokola Tanpa Batas) - Sulawesi

⁶ *Handwritten text in Indonesian script, likely a reference or citation.*
⁷ Tertuang dalam Misi RPJPN 2005 -2025 dan pada arah Pembangunan Jangka Menengah kedua
⁸ *Handwritten text in Indonesian script.*
⁹ *Handwritten text in Indonesian script.*
¹⁰ *Handwritten text in Indonesian script.*

Bab III. Status Implementasi PPB di Beberapa Wilayah di Indonesia

Pelaksanaan program yang benar tentu saja memerlukan alat evaluasi yang tepat berdasarkan pemahaman yang utuh atas permasalahan yang ada. Dengan menggunakan tabel indikator pencapaian, bisa kita peroleh informasi mengenai status implementasi PPB di beberapa wilayah di Indonesia.

Indikator Pencapaian yang Dipakai dan Penjelasannya

Kerangka tabel PPB dari *Education for Sustainable Development Toolkit (versi 2/2002)*, oleh Rosalyn McKeown, Ph.D. digunakan sebagai acuan untuk melihat program yang dikumpulkan berbasis PPB atau lebih menekankan aspek atau isu tertentu.

Untuk mengembangkan program berbasis PPB, pelaku perlu mengidentifikasi pengetahuan, isu, perspektif, keterampilan, dan nilai-nilai sentral pembangunan berkelanjutan di masing-masing bidang lingkungan, ekonomi, dan masyarakat/sosial, semuanya harus terbahaskan dalam kurikulum ataupun program yang berorientasi keberlanjutan. Tabel 5 menunjukkan aspek pengetahuan, isu, kemampuan, perspektif, dan nilai-nilai ketiga bidang tersebut sangat penting untuk menunjukkan interaksi dan hubungan sebab - akibat antara manusia dengan alam - lingkungannya.

Tabel 5. Contoh Matriks Isian Indikator Pencapaian PPB

Aspek Indikator	Bidang		
	Ekologi - Lingkungan	Ekonomi	Sosial
Pengetahuan			
Isu			
Ketrampilan/Kemampuan			
Perspektif			
Nilai-Nilai			

Setelah suatu program memenuhi kerangka PPB berdasarkan tabel di atas, pencapaian program dari kondisi awal, proses, dan refleksi pembelajaran yang terjadi selama penerapan, hingga hasil dan efek yang dihasilkan dituangkan dalam 8 indikator pencapaian dengan menggunakan referensi "*Monitoring and Assessing Progress during the UNDES in the Asia-Pacific Region: A Quick Guide to Developing National ESD Indicators*", yaitu indikator dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Delapan Indikator Pencapaian Program PPB

Indikator	Penjelasan
<i>Baseline</i>	Gambaran umum aspek ekologi – sosial – ekonomi areal pelaksanaan PPB sebelum program dilakukan
<i>Context</i>	Keberadaan sistem pendukung untuk pelaksanaan PPB
<i>Process</i>	Proses dari kegiatan-kegiatan PPB
<i>Learning</i>	Pembelajaran dan refleksi PPB dari proses
<i>Output</i>	Hasil yang dicapai setelah program atau kegiatan
<i>Outcome</i>	Perubahan atau perbaikan yang terjadi setelah keseluruhan rangkaian kegiatan/upaya PPB dilakukan
<i>Impact</i>	Dampak/efek yang dihasilkan program PPB
<i>Performance</i>	Perubahan yang terjadi secara keseluruhan setelah program



Foto : Dokumentasi Lembaga Konservasi - Lampung

Status Implementasi PPB di Beberapa Wilayah Sebaran

Berikut ini adalah kajian terhadap status implementasi program PPB oleh LSM. Hasil kajian diharapkan bisa menjadi acuan bagi LSM dalam mengantisipasi pengembangan program PPB ke depannya di Indonesia. Wilayah sebaran geografis pelaksanaan program PPB yang tercakup dalam laporan ini terlampir.

Tabel 7. Status Implementasi dan Kajian Kebijakan PPB di Indonesia

Kebijakan PPB di Indonesia	
Status Implementasi	Kajian
<ul style="list-style-type: none"> • Di tingkat nasional UUD 1945 Pasal 31 ayat 3, UU No. 20 Tahun 2003 secara jelas telah mencantumkan tentang pembangunan berkelanjutan. Lebih detail lagi UU No. 17 Tahun 2007 tentang tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. • Kebijakan dan strategi nasional pembangunan berkelanjutan telah pula dicerminkan dalam misi RPJPN tahun 2005-2025. <p>Dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan antara lain UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 38 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UU No. 32 Tahun 2009 (Pasal 1 ayat 3) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014; serta Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No. 03/MENLH/02/2010 dan N.o 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.</p> <p>Di tingkat Provinsi, kota maupun kabupaten, beberapa kebijakan yang dimiliki antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perda Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. -Perda Kota Surabaya No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; ataupun 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Implementasi PPB di Indonesia menemukan bahwa implementasi PPB di Indonesia belum eksplisit dan optimal. Hal ini tercermin melalui belum tampak adanya peraturan, kebijakan, program yang secara eksplisit diarahkan untuk menerapkan PPB, dari tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan sesuai dengan amanat Dekade PPB. • Dampak yang ditimbulkan adalah lemahnya koordinasi dan sinergi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan pendidikan serta tingkat pemahaman para pemangku kepentingan tentang pembangunan berkelanjutan dan PPB. • Istilah PPB umumnya dikenal oleh LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan belum ada survey yang memantau pemahaman PPB pada LSM yang bergerak di bidang selain lingkungan. Umumnya, LSM mengikuti perkembangan dunia internasional yang berkaitan dengan bidang yang menjadi fokus kegiatan lembaganya. Walaupun staf dan anggota LSM umumnya paham terhadap isu-isu hangat yang terjadi di bidang garapan mereka, tidak banyak yang memberikan perhatian terhadap kebijakan yang berlaku dan berkaitan dengan isu tersebut. Pengetahuan tentang adanya MoU antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Lingkungan Hidup tentang penyelenggaraan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu contohnya. LSM umumnya lebih fokus pada proyek dan implementasi di lapangan daripada bergelut langsung dalam hal kebijakan. Untuk itu, disarankan agar LSM lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan agar berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah dalam mengembangkan, menjalankan dan mengkaji ulang kebijakan terkait PPB.

Kebijakan PPB di Indonesia

Status Implementasi	Kajian
<ul style="list-style-type: none"> • - Perda Kabupaten Badung No. 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; serta Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. • Namun tidak semua provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia memiliki kebijakan yang terkait dengan PPB. LSM umumnya tidak terlibat dalam penyusunan maupun kajian kebijakan pemerintah ttg PPB. Pengetahuan LSM tentang kebijakan juga relatif minim, dan berdampak pada perhatian LSM pada kebijakan yang ada serta partisipasi dalam kajian kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Di samping itu, perlu koordinasi yang lebih kuat antara LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan agar pelaksanaan PPB lebih terpadu dan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. • Partisipasi aktif LSM dalam implementasi PPB bekerjasama dengan pemerintah jelas terlihat pada provinsi yang sudah memiliki kebijakan PLH dan PPB. Provinsi yang telah memiliki kebijakan PLH/PPB umumnya terbuka dalam hal kemitraan dengan LSM. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi LSM untuk terlibat aktif dalam berbagai kajian kebijakan bersama dengan pemerintah. LSM yang bekerja di wilayah provinsi di Jatim, Jabardari Bali adalah contoh yang baik tentang bagaimana kebijakan memberikan pengaruh terhadap kemitraan antara pemerintah dan LSM. Ada beberapa provinsi yang memiliki kebijakan PPB seperti Kalimantan Timur. Namun di sana belum terjadi pengembangan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan para pemangku kepentingan termasuk LSM dalam hal implementasi PPB. • Pada provinsi yang memiliki kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan, pemerintah setempat pada umumnya belum sepenuhnya menyediakan akses kepada LSM untuk melaporkan perkembangan kegiatan LSM serta memfasilitasi LSM untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. • Secara umum pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota tidak mempunyai peraturan ataupun kebijakan yang menjelaskan kegiatan PPB secara spesifik, akan tetapi terdapat dalam bentuk kegiatan pengelolaan, perlindungan dan pendidikan lingkungan hidup

Tabel 8. Status Implementasi dan Kajian Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia

Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia	
Status Implementasi	Kajian
Pendidikan Formal (terkait kurikulum, manajemen dan pendekatan terpadu)	
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan PPB yang dilakukan oleh LSM dimulai dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek mengenai PPB, mulai dari tingkat konsep, metodologi pembelajaran, hingga penerapan pendekatan menyeluruhsekolah. • Penerapan PPB untuk pendidikan formal, diawali pada tahun 2005 dengan peluncuran Program Adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pada penerapannya KLH bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) mendampingi 10 sekolah pilot untuk menerapkan pendekatan menyeluruh sekolah (<i>Whole School Approach</i>), yang meliputi kebijakan, kurikulum, infrastruktur dan kegiatan yang berbasis partisipatif. Tiga tahun kemudian, sekolah-sekolah tersebut mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Menteri LH. • Secara konseptual, PPB ini dianggap rumit, untuk dipahami dan diterapkan secara langsung dalam pendidikan formal, sehingga perlu pendampingan untuk menerapkan praktek-praktek pendekatan menyeluruh sekolah. Pendampingan yang cukup intensif telah memberikan perubahan dan keberhasilan yang berarti. Proses pendampingan, dilakukan melalui proses <i>self assessment</i>, penyusunan Rencana Strategi Sekolah, integrasi PPB ke dalam kurikulum melalui integrasi muatan lokal kedalam mata pelajaran sesuai dengan kurikulum nasional (KTSP), penataan lingkungan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, serta pelibatan para pihak masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara konsep, program Adiwiyata merupakan penerapan dari PPB. Namun dalam pelaksanaannya, program Adiwiyata dipandang sebagian besar sekolah sebagai ajang kompetisi sekolah untuk mendapat penghargaan/predikat Sekolah Adiwiyata. Sarana dan prasarana sekolah masih dipandang sekolah sebagai tolok ukur keberhasilan program tersebut. • Pendidik mempunyai beban kerja yang relatif tinggi, terlebih lagi bagi guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran, terutama untuk tingkat sekolah dasar. Atas dasar tersebut setiap penambahan materi/isu baru termasuk PPB – akan menjadi beban baru. Hal ini dapat menimbulkan keengganan menerapkan PPB, • Keberhasilan penerapan PPB untuk pendidikan formal diberbagai tempat, sangat didukung oleh program peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, workshop, dan studi komparatif untuk warga sekolah serta kebijakan dari pemangku kepentingan (Sekolah dan Dinas Pendidikan). • Berdasarkan pengalaman LSM, pendampingan intensif merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan PPB dalam pendidikan formal. Melalui pendampingan, motivasi dan komitmen, dan dilakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala, terbukti dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendampingan tersebut. • Keterbatasan kapasitas dan pengalaman guru dalam proses belajar - mengajar terkait implementasi PPB menjadi salah satu faktor sulitnya penerapan PPB di sekolah. Untuk itu diperlukan peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan dalam memperluas pelaksanaan PPB, sehingga diperlukan adanya integrasi PPB dalam mata kuliah di perguruan tinggi. • Belum ada informasi tentang perkembangan laporan dari Akademisi dan Lembaga Penelitian. • Bahan ajar bagi guru dan siswa dalam implementasi PPB dirasa sangat kurang, sehingga pemahaman para penulis buku pelajaran untuk mengembangkan dan menginternalisasi PPB dalam materi ajar sangat diperlukan.

Tabel 8. Status Implementasi dan Kajian Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia

Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia	
Status Implementasi	Kajian
Pendidikan Formal (terkait kurikulum, manajemen dan pendekatan terpadu)	
<ul style="list-style-type: none"> Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Malang (UNM), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) serta Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud dan RCE (<i>Regional Center of Expertise on ESD</i>) telah melakukan penelitian tentang berbagai aspek PPB, akan tetapi hasil penelitian tidak menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPB. 	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan proses penerapan PPB di Pendidikan Formal sangat ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan mulai ditingkat guru, kepala sekolah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Pendidikan, Kepala Daerah hingga Menteri Pendidikan maupun <i>national focal point</i> ESD UNESCO, yang memiliki kemampuan menerjemahkan PPB dalam konteks pendidikan formal. Kerjasama sekolah dengan masyarakat, sangat penting untuk pertukaran pembelajaran dan keahlian, serta untuk mendukung penerapan menyeluruh PPB
Pendidikan Nonformal serta Pendidikan Informal (<i>local knowledge</i>) dan partisipasi masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan nonformal yang dilakukan oleh LSM di berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan bidang gerak masing-masing lembaga, misal kesehatan, peningkatan ekonomi, pertanian organik, dan lain-lain. Beberapa program dikembangkan berdasarkan kebutuhan di lapangan, yang kemudian dikaitkan dengan visi – misi lembaga. Selain itu, adapula program untuk anak-anak yang tidak terjangkau oleh sekolah karena alasan- tertentu. Beberapa LSM mengelola program pendidikan informal untuk anak usia sekolah dimana kerangka program tersebut tidak tercakup dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. 	
<p>Isu Lokal</p> <p>Isu-isu lokal yang muncul di dalam kerangka PPB cukup banyak, tergantung pada keadaan di masyarakat dan kondisi geografis tempat tinggal sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Beberapa isu sangat khusus misalnya pada daerah pesisir umumnya memunculkan masalah ketersediaan air tawar, kemiskinan, atau transportasi laut yang bergantung pada kondisi gelombang; daerah pegunungan dan hutan mengangkat isu alih fungsi lahan, keanekaragaman hayati, dll; daerah pedesaan dan perkotaan sebagian besar mengangkat isu pencemaran, kualitas air, dan transportasi.</p>	<p>Isu Lokal</p> <p>Untuk menjadikan isu lokal sebagai bagian dari konsep PPB, masih dibutuhkan beberapa tahapan untuk menjawab isu-isu tersebut dengan kerangka kehidupan yang berkelanjutan. Tahapan tersebut antara lain: 1) mengeksplorasi isu tersebut berdasarkan keterkaitannya dengan bidang lain yaitu sosial budaya – ekonomi – ekologi; 2) melihat isu lokal dalam perspektif global; dan 3) memetakan aspek pengetahuan, nilai-nilai, ketrampilan-kemampuan dan perspektif dari setiap bidang. Alat dan cara mengukur ketercapaian program terkait isu lokal, bergantung pada pelaksana program. Sehingga ketercapaian pun sangat beragam sesuai asumsi masing-masing.</p>

Tabel 8. Status Implementasi dan Kajian Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia

Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia	
Status Implementasi	Kajian
<p>Partisipasi Masyarakat Sebagian besar LSM yang berkegiatan dengan masyarakat, umumnya menggunakan pendekatan peningkatan pendapatan atau kesehatan sebagai pintu masuk, yang capaiannya dapat memberi dampak positif pada pelestarian alam, seperti pertanian organik, konservasi hutan atau laut. Peningkatan pendapatan juga dimaknai dengan mengurangi pengeluaran.</p> <p>Beberapa LSM yang berkegiatan dengan masyarakat untuk isu-isu yang tidak terkait dengan konservasi alam atau pendidikan lingkungan, tidak mengenal konsep PPB, walaupun Simpul Wilayah berasumsi bahwa program tersebut memiliki warna PPB yang beracuan pada keseimbangan ekonomi-ekologi-budaya.</p> <p>Pengetahuan dan Budaya Lokal Hampir di setiap daerah ditemukan budaya dan pengetahuan lokal yang berakar pada kondisi alam di daerah tersebut. Kegiatan dan pengetahuan lokal itu pun berdampak pada sumber kehidupan yang akan ada terus menerus. Contohnya Subak Bali, Hamemayu Hayuning Bawono, Sedekah Bumi, Adat Laot, dan lain-lain. Semua itu berjalan sebelum muncul konsep Pembangunan Berkelanjutan di tingkat internasional. Tetapi budaya dan pengetahuan lokal tersebut mulai bergeser karena tidak cukup menarik bagi pemuda dan tergerus oleh modernisasi.</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Penerapan PPB di masyarakat membutuhkan perencanaan yang lebih rumit dibandingkan dengan di sekolah. Keberagaman karakter, pekerjaan, dinamika kehidupan, dan kondisi sosial ekonomi dan alam di setiap daerah dapat mempengaruhi strategi dan pendekatan yang tepat sasaran. Ekonomi menjadi salah satu pintu masuk strategis untuk mengajak masyarakat mengubah pola kehidupan lebih berwawasan keberlanjutan. Di masa mendatang diperlukan pemaknaan model ekonomi hijau atau wawasan pembangunan berkelanjutan yang lebih tepat dan mudah dipahami masyarakat.</p> <p>Keterlibatan dan kerjasama secara terus menerus antar pihak terkait sangat penting dibangun pada saat gerakan PPB dilaksanakan bersama masyarakat.</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah seperti PNPM mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat di daerah setempat. Namun umumnya kebutuhan yang dipenuhi lebih pada kebutuhan publik dalam bentuk fisik. Pengelolaan program ini pun sangat tergantung pada kemampuan masyarakat daerah dan fasilitator di daerah tersebut.</p> <p>Pengetahuan dan budaya Lokal Masyarakat Indonesia telah memiliki konsep kehidupan dan penghidupan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi alam dan cara masing-masing. Konsep itu harus diwariskan sebagai penerapan PPB di masyarakat agar dapat bermakna untuk menghidupkan kembali pengetahuan dan budaya lokal yang pada kenyataannya memberikan dampak positif pada alam maupun menjaga keberlanjutan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.</p> <p>Budaya lokal merupakan potensi yang sangat penting untuk dikaitkan dan direfleksikan pada konsep-konsep yang bergulir di tingkat global. Hal ini menjadi salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan agar generasi muda tertarik untuk menghargai dan mempertahankan jati diri tersebut sebagai bagian dari masyarakat global.</p>

Tabel 8. Status Implementasi dan Kajian Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia

Lembaga Pendidikan PPB di Indonesia	
Status Implementasi	Kajian
	<p>Budaya lokal merupakan potensi yang sangat penting untuk dikaitkan dan direfleksikan pada konsep-konsep yang bergulir di tingkat global. Hal ini menjadi salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan agar generasi muda tertarik untuk menghargai dan mempertahankan jati diri tersebut sebagai bagian dari masyarakat global.</p> <p>Pengetahuan lokal yang telah memiliki perspektif dunia harus dipromosikan secara luas oleh media massa, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki dan mempertahankan kepemilikan akan kekayaan Indonesia tersebut.</p> <p>Catatan kaki: CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS (UNESCO Paris, October 20, 2005), mengingatkan beberapa hal tentang budaya dan pengetahuan lokal, salah satunya adalah 'sadar bahwa keragaman budaya menciptakan dunia yang kaya dan beragam (<i>Being aware that cultural diversity creates a rich and varied world, which increases the range of choices and nurtures human capacities and values, and therefore is a mainspring for sustainable development for communities, peoples and nations</i>).</p> <p><i>Article 2.6</i> dan <i>article 13</i> menekankan akan budaya sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan yang penting untuk generasi sekarang dan masa depan.</p> <p><i>Article 10</i> dan <i>11</i> menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat, peran pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat keberadaan keragaman budaya sebagai jaminan akan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan.</p>



Foto : Dokumentasi WWF Indonesia - ESD Unit

Tabel 9 Status Implementasi dan Kajian Peningkatan Kapasitas PPB di Indonesia

Peningkatan Kapasitas	
Status Implementasi	Kajian
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan PPB di berbagai sektor pendidikan, diawali dengan pelatihan, termasuk pelatihan untuk pelatih. • Model <i>multi level training</i>, seperti yang dilakukan di beberapa wilayah oleh guru/kepala sekolah/UPTD yang pernah mengikuti training, kepada sekolah lain, memperluas penyebaran pemahaman tentang PPB. • Tahun 2010/2011 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di tiap propinsi menyelenggarakan pelatihan yang dikenal dengan Pendidikan untuk Perkembangan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan (PUP3B) untuk fasilitator dan guru dalam jumlah terbatas. • Beberapa praktisi dari Indonesia, mendapat pelatihan yang diselenggarakan di berbagai negara seperti Swedia (Ramboll), India (CEE) dan Thailand (Atkinsons Asia) meningkatkan kompetensi pelaku PPB. • Selain pelatihan, berbagai kegiatan studi komparatif, lokakarya dan seminar. Program implementasi yang disertai dengan pendampingan intensif memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan PPB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseriusan dan komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional sebagai <i>focal point</i> di tingkat nasional tidak memprioritaskan PPB sehingga program peningkatan kapasitas bagi pendidik maupun praktisi pendidikan tidak mendapat perhatian cukup. Hal ini berdampak minimnya pemahaman para pihak tentang PPB. • Kurangnya sumberdaya (narasumber dan dana pendukung) untuk melakukan pelatihan yang menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas, merata, dan sistematis menyebabkan pemahaman tentang PPB terbatas pada kelompok yang pernah mendapat pelatihan. Untuk itu kerjasama multipihak termasuk dengan pihak swasta sangat diperlukan. • Perlu model pelatihan yang memanfaatkan jejaring kerja seperti LPTK, Perguruan Tinggi, P4TK, LPMP, jejaring LSM, komunitas pemerhati pendidikan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dalam menyebarluaskan pemahaman tentang PPB dan dukungan untuk implementasi PPB. • Terhimpunnya <i>baseline data</i> pendampingan yang terpusat membantu proses monitoring dan evaluasi serta menjadi basis informasi bagi jaringan maupun pemangku kebijakan.



Foto : Dokumentasi Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 10. Status Implementasi dan Kajian Peran Sektor Swasta, Kemitraan dan Donor dalam

Peran Sektor Swasta, Kemitraan dan Donor	
Status Implementasi	Kajian
<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa tahun terakhir, kerjasama antar LSM dengan dinas pemerintah terkait di daerah mulai banyak terjadi. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan masing-masing, baik dengan Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Pengawas Makanan, dll. • Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) turut mendorong perusahaan untuk bekerjasama dengan LSM sebagai pelaksana program di lapangan. Hal ini semakin mengoptimalkan percepatan pencapaian tujuan perbaikan kesejahteraan di masyarakat. • Program-program yang berakar pada konsep PPB maupun Pembangunan Berkelanjutan sangat tergantung pada insiator program maupun lembaga donor. 	<p>Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • LSM yang kerap mendampingi sekolah maupun masyarakat di suatu daerah, terkondisikan untuk kreatif menemukan berbagai strategi kerjasama dan pembagian peran dengan beberapa pihak terkait. • Pergantian individu dan perubahan peraturan terkait, menuntut LSM selalu siap berganti strategi yang tepat. • Kemitraan menjadi salah satu prinsip utama PPB. Sehingga pada saat PPB lebih populer di Indonesia beberapa tahun terakhir, kemitraan yang telah dirintis oleh LSM semakin lancar dan berkembang, walaupun masih banyak tantangan dan kendala dalam pelaksanaan agar kemitraan benar-benar mendorong keterlibatan aktif sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing. <p>Sektor Swasta dan Donor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donor sangat berpengaruh pada kerangka project ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga penerima dana. • Peran swasta umumnya melalui program TJSP dijabarkan dalam ISO 26000 tahun 2007, mengenai <i>Guidance on Social Responsibility</i> yaitu tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusandan kegiatan di masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku transportasi yang etis sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; juga mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, yang dapat sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. • Program TJSP awal mulanya bersifat karitatif dan dilakukan oleh perusahaan sendiri.. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran menjadi kemitraan dengan LSM misalnya program sekolah maupun masyarakat yang bersifat edukatif maupun peningkatan kapasitas.

Tabel 10. Status Implementasi dan Kajian Peran Sektor Swasta, Kemitraan dan Donor dalam

Peran Sektor Swasta, Kemitraan dan Donor	
Status Implementasi	Kajian
	<ul style="list-style-type: none"> • Program-program yang berjalan dari dukungan TJSP pun perlu mempersiapkan diri dalam keberlanjutan program secara mandiri. Seringkali perusahaan mengubah acuan berganti program. Hal ini tidak hanya pada program TJSP, namun juga program yang didanai oleh donor. <p>Selain itu banyak perusahaan yang mengelola program TJSP sendiri tanpa melibatkan lembaga lain sebagai mitra, hal ini secara tidak langsung akan membawa pengaruh pada lembaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu indikator keterlibatan perusahaan dalam pelestarian lingkungan dapat dilihat pada program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengkategorikan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dalam operasional bisnisnya. Perusahaan yang mengembangkan program yang terkait PPB ataupun Pembangunan Berkelanjutan bisa meningkatkan penilaian perusahaan untuk mendapatkan peringkat PROPER. • <i>Sustainable Responsible Investment</i> (SRI) Index KEHATI merupakan indeks yang dapat menjadi acuan bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perusahaan yang mengembangkan program yang terkait PPB ataupun Pembangunan Berkelanjutan dapat meningkatkan penilaian perusahaan untuk masuk dalam SRI Index KEHATI yang berjumlah 25 perusahaan yang dikaji secara berkala.

Tabel 11. Status Implementasi dan Kajian Sistem Informasi dan Publikasi PPB di Indonesia

Sistem Informasi dan Publikasi	
Status Implementasi	Kajian
<ul style="list-style-type: none"> • Telah diproduksi sejumlah film bertemakan lingkungan di Indonesia • Perpustakaan sekolah menjadi rumah belajar bagi warga sekolah dan masyarakat. • Meskipun begitu, dampak publikasi yang ada dirasakan sangat lemah, hanya diketahui segelintir lembaga ataupun forum/lembaga yang bergerak dibidang yang sama. • Telah terbentuk sistem informasi yang cukup memadai sebagai prasyarat persebaran program PPB yakni adanya program internet di kecamatan tetapi masyarakat tidak bisa mengaplikasikan dan tidak ada operatornya. • Beberapa publikasi dan aksi menuju sistematisasi pengenalan konsep PPB telah dihasilkan oleh sejumlah lembaga antara lain newsletter “Banir” di kawasan HOB, situs Pustaka Borneo, dan buku pelajaran PLH serta pembentukan MGMP PLH 	<ul style="list-style-type: none"> • Media informasi/publikasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh penggiat pendidikan masih bersifat tradisional. Pada umumnya media informasi untuk pembelajaran yang digunakan berupa pemutaran film yang disiapkan oleh LSM pendamping atau film – film yang diberikan dari departemen pendidikan yang dibagikan melalui dinas pendidikan di kabupaten. Film ini sangat bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar, sayangnya alat untuk pemutaran film tidak dimiliki oleh seluruh terutama sekolah di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan aliran listrik. • Kegiatan belajar dan mengajar kewajiban membaca buku di perpustakaan diperlukan untuk membiasakan atau menggalakan budaya gemar membaca baik untuk murid maupun pendidik. Perpustakaan sekolah umumnya belum optimal dimanfaatkan oleh sekolah maupun warga sekitar. • Program Internet Masuk Desa yang diinisiasi Kemenkoinfo adalah sebuah langkah awal yang baik. • Namun banyak perangkat komunikasi yang telah disiapkan tidak dapat digunakan masyarakat secara optimal. Umumnya terjadi kerusakan alat, tidak ada petugas operator dan mahal biaya pulsa untuk warga desa. • Walaupun sudah majunya teknologi untuk mendapatkan informasi dan media publikasi namun penyebarluasan melalui media cetak masih sangat diperlukan mengingat tidak meratanya penyebaran jaringan komunikasi terutama di daerah terpencil. • Dalam penyebaran PPB, pemanfaatan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dinilai cukup efektif untuk pelatihan dan pertukaran pengetahuan di kalangan pendidik. • Pembuatan media informasi dan publikasi umumnya didapat dari : <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun sendiri oleh lembaga bersangkutan. - Media massa. - Berbagi pengalaman / dari hasil diskusi. - Mengoptimalkan fungsi jejaring.

Tabel 12. Status Implementasi dan Kajian Jejaring PPB di Indonesia

Sistem Informasi dan Publikasi	
Status Implementasi	Kajian
<ul style="list-style-type: none"> Banyak jejaring yang terbentuk dengan tujuan masing-masing, baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Jejaring tersebut terbentuk dan berjalan sesuai dengan misi dan bidang gerak masing-masing anggotanya, seperti pertanian organik, masyarakat adat, pendidikan lingkungan, kesehatan, perdagangan adil, HAM, maupun isu gender (detail anggota jaringan terlampir). 	<ul style="list-style-type: none"> Jejaring tersebut dikelola dengan caranya masing-masing. Namun, perbedaan kondisi infrastruktur, geografis, dan budaya daerah yang beragam di Indonesia, menjadi kendala kelancaran koordinasi dan komunikasi serta kemampuan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antar anggota jaringan. Kondisi ini banyak mempengaruhi perjalanan jaringan. Selain, itu masih dibutuhkan peningkatan kapasitas dalam berkegiatan dan mengelola jaringan. Hal ini sangat mempengaruhi dinamika dalam berjejaring maupun keberlanjutan jaringan tersebut. Komunikasi antar anggota jaringan, juga harus diimbangi dengan penyampaian informasi jaringan di dalam internal lembaga maupun di wilayah yang berdekatan. Jaringan-jaringan yang berbasis isu, sangat tergantung trend dari isu tersebut, maupun konsistensi anggota jaringan pada isu yang sedang berkembang



Foto : Dokumentasi Yayasan KEHATI

Bab IV. Capaian dan Petikan Pembelajaran PPB di Indonesia

Pelaksanaan Dekade PPB(2005-2014) di Indonesia telah berjalan sebagaimana telah diulas pada bagian terdahulu pada laporan ini. Sejumlah capaian dan petik pembelajaran telah dirangkum pada Tabel 12 untuk membantu memahami situasi terkini terkait PPB di Indonesia.

Tabel 13. Capaian dan Petik Pembelajaran PPB di Indonesia

Capaian dan Petik Pembelajaran	
Kerangka Internasional untuk Skema Implementasi UNDES D memiliki 5 tujuan:	Panduan Pengembangan Indikator Nasional PPB di Asia Pacific
1. Memfasilitasi hubungan dan jejaring, pertukaran dan interaksi antar para pihak terkait	2. Memfasilitasi jejaring, pertukaran dan interaksi antar para pihak terkait PPB;

Jejaring

Jejaring adalah salah satu alat efektif untuk percepatan penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas individu maupun lembaga. Hingga saat ini, masih dibutuhkan kemampuan dalam mengelola maupun menggunakan jejaring untuk suatu pergerakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

Peranan Sektor Swasta, Kemitraan, Donor

Jumlah kemitraan antar berbagai mitra semakin banyak dan berkembang secara kuantitatif. Namun masih perlu ditingkatkan kualitas keterlibatan dan peran masing-masing sesuai kapasitas. Dalam satu dekade PPB sudah mulai bertumbuh kemitraan antar pemerintah, sektor swasta (program CSR) dan LSM.

Ada tidaknya warna PPB maupun pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada ada tidaknya wacana dan kemampuan PPB dan pembangunan berkelanjutan pada pihak yang terlibat dan berperan besar pada program. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa banyak sektor swasta berorientasi pada pelaksanaan program yang berjangka waktu singkat, melibatkan banyak orang dan diliput banyak media, sementara PPB lebih berorientasi pada proses, dan keberlanjutan suatu program.

Di lain pihak perencanaan kemandirian dalam keberlanjutan program sangat penting dipersiapkan dengan tepat untuk mendorong keterlibatan aktif dari penerima program untuk tidak mengandalkan ketergantungan pada pihak pemberi dana.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa LSM memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan PPB di Indonesia, karenanya di masa depan perlu ada peningkatan kemitraan antar pemerintah, sektor swasta, LSM dan kelompok masyarakat lainnya.

Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) juga menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian, karena bila calon guru telah memiliki kepedulian dan turut berpartisipasi aktif dalam gerakan PPB, maka pembangunan berkelanjutan dimasa depan akan sangat menjanjikan.

Sistem Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur terkait distribusi informasi dan komunikasi masih menjadi kendala, seperti adanya listrik maupun pusat informasi beserta memperbaharui informasi memerlukan penyelesaian yang sesuai kondisi dan karakter disetiap wilayah.

Budaya membaca sangat diperlukan untuk perkembangan dan pengembangan PPB. Di beberapa daerah, hal ini masih menjadi tantangan baik di pendidikan formal maupun di masyarakat.

Informasi pesan singkat melalui telepon seluler tentang PPB perlu dibangun mengingat saat ini alat telekomunikasi ini telah banyak dimiliki pendidik. Radio komunitas (TV komunitas) juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai PPB.

Kegiatan rutin Dinas Pendidikan daerah seperti KKG, MGMP, MKKS dinilai cukup strategis untuk menyebarkan kapasitas dan informasi. Meskipun begitu, diperlukan penguatan jaringan KKG, MGMP, LPTK (perguruan tinggi), Forum rektor dan lain-lain dengan materi-materi PPB atau lembaga pendamping dapat mendampingi jaringan tersebut

2. Memberikan profil peningkatan peranan sektor pendidikan dan pengetahuan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan

2. Menyediakan peluang baru dan bagi negara – negara untuk memasukkan PP dalam reformasi pendidikan

3. Menyediakan ruang dan kesempatan untuk memperbarui dan mempromosikan visi pembangunan berkelanjutan melalui berbagai bentuk pendidikan dan kesadartahuan publik

Pendidikan Nonformal,

Program nonformal sangat berperan sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan formal maupun meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memiliki wacana dan berproses berdasarkan akar PPB maupun pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Lokal

Keberagaman kondisi kehidupan dan penghidupan di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan isu lokal yang muncul pun beragam. Penting untuk meningkatkan kapasitas untuk menganalisa isu lokal tersebut dalam kerangka PPB dan perspektif global. Sementara, pendidikan publik dan pengelolaan kelompok di masyarakat juga penting menjadi bagian program PPB itu sendiri.

Cukup banyak pengetahuan, kearifan lokal, dan budaya lokal di beberapa wilayah di Indonesia sebenarnya telah berakar pada kehidupan dan penghidupan yang berkelanjutan. Namun penting untuk digali dan dipelajari, serta memberikan dasar ilmiah dan pengemasan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan menjaga pada diri kaum muda sebagai kekayaan yang hanya dimiliki Indonesia.

4. Membantu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dalam PPB

4. Membantu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dalam PPB

Pendidikan Formal

Penerjemahan konsep dan kerangka PPB perlu sejalan dengan kurikulum nasional yang berlaku agar mudah dipahami. Untuk itu, pendampingan menjadi strategi kunci utama keberhasilan suatu program di tingkat lapangan dalam jangka waktu tertentu. Diperlukan pula keterlibatan LPTK dan Perguruan Tinggi yang menghasilkan guru agar memasukkan PPB dalam kurikulum pembelajaran mereka. Proses kemitraan antar institusi pendidikan dibutuhkan sebagai ajang saling tukar pengalaman dan pembelajaran semua pihak

Bab V. Kesimpulan Umum dan Rekomendasi

A. Kesimpulan Umum

Keberagaman suku di Indonesia memberikan keanekaragaman budaya di berbagai wilayah. Beberapa budaya memiliki konsep kehidupan dan penghidupan yang selaras dengan alam, sesuai dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development/SD*)

Dalam menganalisa program terkait PPB, tim penyusun menggunakan tabel kerangka *Education for Sustainable development* (PPB) yang menyatukan aspek *Sustainable Development* (Ekologi – Sosial Budaya – Ekonomi) dengan pilar pendidikan (pengetahuan/kognitif – perilaku dan ketrampilan/psikomotorik – nilai dan sikap/afektif, serta untuk PPB juga mempertimbangkan pilar perspektif dan isu. Digunakan pula 8 Indikator Pencapaian PPB. Semua alat pengukuran tersebut di atas mengacu pada dokumen *A Quick Guide to Developing National ESD*

Berdasarkan kajian Kelompok Kerja LSM untuk PPB Indonesia, Dekade PPB yang dicanangkan tahun 2005 – 2014, telah cukup dipahami pada tingkat pemerintahan pusat. Akan tetapi, wacana PPB dari tingkat pusat tersebut tidak menjangkau cukup baik hingga di tingkat daerah. Meskipun begitu, beberapa aturan dan kebijakan baik di tingkat pusat hingga daerah telah memadukan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip PPB.

Pada Laporan Nasional ini, tim penyusun melakukan penalaran pelaksanaan PPB dengan melihat status implementasi secara umum dan melakukan kajian secara bersama-sama pada beberapa hal berikut:

1. Kebijakan.
2. Pendidikan formal.
3. Pendidikan nonformal dan informal.
4. Kemitraan, donor, dan swasta.
5. Jaringan.
6. Publikasi.

Setelah itu secara bersama-sama tim penyusun melakukan refleksi terhadap kondisi implementasi dan kajian yang didapatkan untuk menghasilkan Petik Pembelajaran dan Rekomendasi.

Berdasarkan pembelajaran yang dipetik dari laporan ini, terlihat bahwa di berbagai daerah pemahaman akan kerangka PPB masih terbiaskan dengan kerangka PLH. Sementara, sebagian besar sekolah yang didampingi LSM pun membutuhkan waktu untuk menerapkan PPB karena pada saat itu mereka juga baru pada tahap mengenal PLH. Berdasarkan pengamatan di lapangan, dalam beberapa kejadian, sekolah tidak harus menerapkan PLH terlebih dahulu untuk menerapkan PPB, hal ini sangat tergantung dimana sekolah tersebut berada dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Kesimpulan tim penyusun, kerangka PPB sesuai untuk membangun pola pikir dan gaya hidup dan penghidupan berkelanjutan. Kerangka PPB yang diserap dari dunia internasional, memberi dasar ilmiah pendidikan agar sekolah dan masyarakat menerapkan konsep *sustainable development* yang sudah ada di beragam budaya yang ada di Indonesia, dan menjaga kelestarian budaya tersebut.

Selain itu, kerangka PPB dapat menjadi kerangka umum yang dapat diadaptasi bagi dunia pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal tetap menggunakan acuan pilar pendidikan untuk membelajarkan prinsip kehidupan dan penghidupan yang selaras dengan alam yang sudah ada di Indonesia.

Meskipun begitu, penyusun memahami bahwa sangat diperlukan pemahaman dan kebijakan dari pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah sebagai payung hukum pelaksanaan kesepakatan internasional tersebut.

A. Rekomendasi

Secara umum, pelaksanaan Dekade PPB (*Decade of ESD* 2005-2014) di Indonesia memang masih terkesan sporadis. Peranan LSM cukup vital dalam pelaksanaan PPB di Indonesia karena banyak LSM yang bekerjasama dengan sekolah.

Berdasarkan pelaksanaan selama *Decade of ESD* (2005-2014) di Indonesia sebagaimana telah dikaji dalam bab-bab terdahulu, serta fakta bahwa di Indonesia sendiri terdapat beragam penerjemahan kehidupan berkelanjutan yang sejalan dengan PPB tersebut, maka Kelompok Kerja LSM untuk PPB di Indonesia merekomendasikan agar sejumlah hal di bawah ini untuk ditindaklanjuti untuk melanjutkan penerapan PPB dan mempersiapkan diri untuk memasuki era pasca Dekade PPB:

1. Pengintensifan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan.
2. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan guru (baik lembaga penyiapan calon-calon guru, maupun lembaga pelatihan guru-guru yang sudah bertugas).
3. Penguatan manajemen sekolah untuk mendukung keberlanjutan dan penyebaran program.
4. Penguatan jejaring sekolah yang terdiri dari kelompok-kelompok sekolah (MGMP, KKG, MKKS) serta reformasi kelompok kegiatan yang ada.
5. Pemerataan dalam peningkatan kapasitas guru dalam satu sekolah untuk menjaga keberlanjutan program.
6. Pembinaan dasar pendidikan, seperti “*Reading Literacy*” melalui penyediaan semakin banyak bacaan terkait PPB dalam Bahasa Indonesia yang memadai.
7. Pemanfaatan hasil penelitian untuk lebih bisa diterapkan dan digunakan di lapangan
8. Penguatan pertukaran informasi antar guru melalui media teknologi informasi.
9. Penguatan penulisan publikasi dan peningkatan kapasitas media massa terkait PPB.
10. Peningkatan kapasitas LSM di bidang kebijakan PPB dan mendorong LSM makin proaktif melakukan advokasi.



Foto : Dokumentasi Putera Sampoerna Foundation-School Development Outreach

Referensi

Better Policies for Better Lives. PISA 2012 Results. Retrieved February 16, 2014 from Better Policies for Better Lives web site: <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm>

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Survei Internasional Pisa. Retrieved February 16, 2014 from Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan web site: <http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pisa>

Republik Indonesia (2003) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.

Statistik, B. P. S. (n.d.). Education indicator. Retrieved February 16, 2014, from Badan Pusat Statistik Indonesia website http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php/excel.php?id_subyek=28&tab=1

The World Bank Office Jakarta (2010). Transforming Indonesia's Teaching Force Volume I: Executive Summary. Jakarta: The World Bank Indonesia

Lampiran 1. Dasar Hukum PPB

Payung Hukum Nasional	Pasal / Bagian
<p>UU 1945</p>	<p>pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa: “ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”</p>
<p>UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<p>Pasal 3 “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional adalah membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif, yang meliputi: cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, serta cerdas kinestetik”.</p> <p>Pasal 4 ayat 1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</p> <p>Pasal 4 ayat 3 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.</p> <p>Pasal 4 ayat 4 Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran</p>
<p>UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 -2025</p>	<p>Kebijakan dan strategi nasional pembangunan yang berkelanjutan dicerminkan dalam misi RPJPN 2005-2025, yakni: “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; serta mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.</p> <p>Pembangunan Jangka Menengah Ke-2 (2010-2014) mengarahkan bahwa “pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dikembangkan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat, proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang”.</p>

Payung Hukum Nasional	Pasal / Bagian
<p>UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 65 ayat (1); Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.</p> <p>Pasal 65 ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>Pasal 66; Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.</p> <p>Pasal 67; Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
<p>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 -2014</p>	<p>Paradigma Pendidikan: 1.2.5 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B).</p> <p>Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet Bumi, dan bahkan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Paradigma ini pun menghendaki keberlanjutan kesehatan lingkungan dengan cara menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, melestarikan komponen-komponen dalam ekosistem, dan menjaga keseimbangan interaksi antarkomponen dalam ekosistem. Selain itu, setiap bentuk intervensi manusia atas keseimbangan ekosistem baik itu melalui upaya-upaya pengembangan yang dosis intervensinya rendah sampai dengan pembangunan yang dosis intervensinya tinggi harus dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan, tidak mengancam keberlanjutan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui.</p>
<p>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 -2014</p>	<p>1.2.d. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B).</p> <p>Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan Planet Bumi, dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan yang baik dan buruk termasuk pembangunan</p>
<p>Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No 03/MENLH/02/2010 dan No 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 2 tentang Ruang Lingkup pada kesepakatan tersebut meliputi:</p> <p>a. Pengembangan pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan (ESD) termasuk pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai wadah atau sarana menciptakan perubahan pola pikir, sikap, serta perilaku manusia yang berbudaya lingkungan hidup;</p> <p>b. Koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program pendidikan lingkungan hidup jangka pendek, menengah, dan panjang, sebagai bagian dari ESD;</p>

Lampiran 2. Payung Hukum PPB di Berbagai Daerah

Dasar Hukum	Pasal
Mencakup semua unsur PPB	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 2) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 4) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial demokratis dan bertanggung jawab, berbudaya, berwawasan lingkungan, cinta tanah air, berkebangsaan, dan bermoral Pancasila, serta berwawasan global.
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 2) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mapu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga.
Perda Provinsi Kalimantan Timur No 03 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	Menghasilkan keluaran satuan pendidikan yang mampu: a. Berperilaku anif dan bijaksana yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Menghargai kemajemukan agama, suku, bangsa, budaya dan status dalam kehidupan yang demokratis. c. Menguasai, memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi dan seni. d. Berperan serta dalam proses alih ilmu dan teknologi dalam memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya alam yang tersedia. e. berdaya saing tinggi, berkepribadian bangsa, memiliki integritas sosial, dan mampu menjawab tantangan zaman. f. Mendukung konsep dan strategi Pembangunan Kalimantan Timur. g. Bersaing secara jujur, bekerjasama dalam kebaikan, mandiri dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum	Pasal
Pembelajar Seumur Hidup	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 2 huruf d) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses transfer nilai (pembudayaan) dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat
Fokus Pada Pembelajar	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 2 huruf e) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan
Pendekatan Holistik	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 2 huruf c) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya lokal dan kebhinekaan

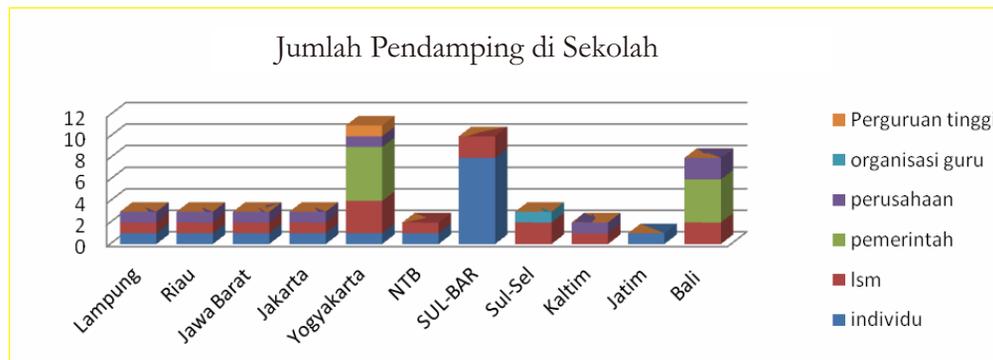
Dasar Hukum	Pasal
Beragam Metode Kerja Demokratis	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<p>(Pasal 3 ayat 4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya lokal dan kebhinekaan</p> <p>(Pasal 3 ayat 7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.</p>
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<p>(Pasal 2 huruf b) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai etika, sosial dan kultural, serta kemajemukan bangsa.</p> <p>(Pasal 2 huruf g) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan secara sama dan seimbang;</p>
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	<p>(Pasal 3 ayat 4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.</p> <p>(Pasal 3 ayat 7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.</p>
Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	<p>(Pasal 11 ayat 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan</p>
Berpikir Mendalam	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<p>(Pasal 3 ayat 5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan</p>
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<p>(Pasal 2 huruf e) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.</p>

Dasar Hukum	Pasal
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan
Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 10 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 11 ayat 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan
Beragam Perspektif yang Berbeda	
Perda Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan
Perda Kabupaten Kebumen No 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 2 huruf e) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.
Perda Kabupaten Badung No 5 Tahun 2008 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	(Pasal 3 ayat 5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan
Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	(Pasal 11 ayat 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.



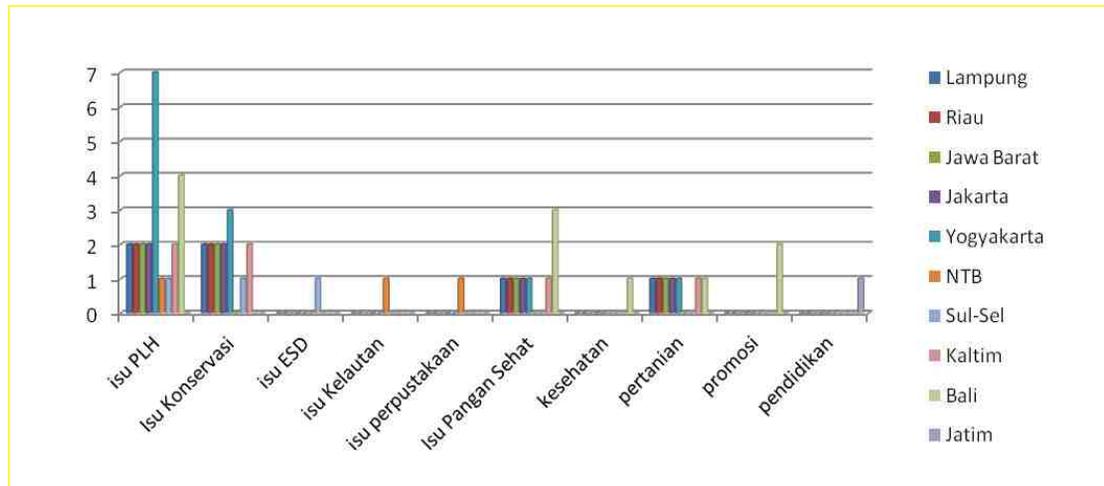
Foto : Dokumentasi WWF Indonesia-ESD Unit

Lampiran 3. Pendamping Sekolah di Indonesia



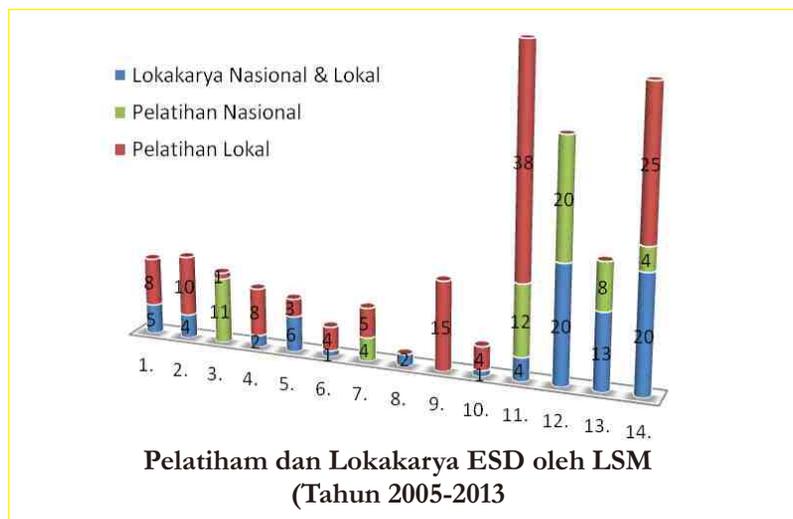
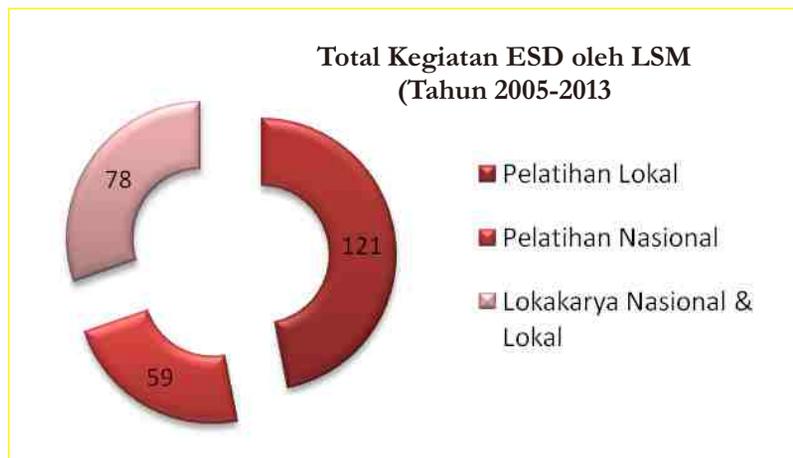
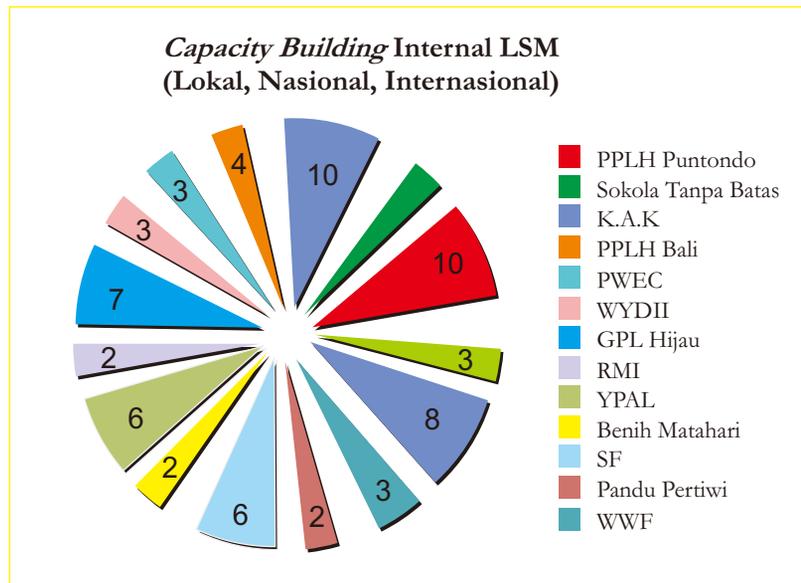
1. Provinsi Yogyakarta memiliki keragaman pendamping sekolah terbanyak yang terdiri dari perguruan tinggi (PT), CSR perusahaan, Dinas/badan pemerintah, LSM, dan Individu
2. Provinsi Sulawesi Barat memiliki pendamping individu terbanyak yaitu 8 orang.
3. Ada 6 provinsi yaitu Lampung, Riau, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki pendamping perusahaan yang berkolaborasi bersama LSM dan Individu
4. Provinsi Bali satu-satunya yang didampingi oleh perusahaan tanpa berkolaborasi dengan LSM, individu, ataupun Dinas.
5. Provinsi Sulsel satu-satunya yang didampingi oleh kelompok guru
6. Provinsi Yogyakarta satu-satunya yang didampingi oleh Perguruan Tinggi.

Pemetaan Isu yang diangkat dalam Pendampingan Sekolah



1. Isu PLH ada di 10 provinsi yaitu Sulawesi Barat, Bali, Lampung, Riau, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur
2. Isu pangan sehat seperti “kantin sehat” ada di 7 provinsi.
3. Isu kelautan dan isu perpustakaan hanya ada di NTB
4. Isu ESD/pembangunan berkelanjutan ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
5. Isu pendidikan khususnya kurikulum 2013 hanya ada di Jawa Timur
6. Isu kesehatan seperti imunisasi dan UKS hanya ada di provinsi Bali.
7. Promosi produk perusahaan juga masuk ke dalam isu yang ada di sekolah di provinsi Bali.

Lampiran 4. Kegiatan PPB oleh Beberapa LSM di Indonesia



Lampiran 5. Kompilasi Data Kegiatan Analisa NatRep ESD-LSM

Lembaga	Program	Kelompok Sasaran	Lokasi	Proses Pembelajaran	Keseimbangan			
					Ekologi	Sosial	Ekonomi	
WWF Indonesia/TNTC	Kawasan Taman nasional Teluk Cendrawasih	Sekolah dan masyarakat di desa	Teluk Cendrawasih	Pelatihan guru	Pemanfaatan dan pengelolaan SDA laut dan darat	Lokasi kampung jauh berdampak pada transportasi sulit dan terbatas informasi	Keterbatasan pasar, harga jual hasil masyarakat rendah, pengolahan hasil laut	Pola pembelajaran di sekolah memasukkan isu lingkungan-sosial-ekonomi untuk kepedulian lingkungan di TNTC.
IDEP	<i>Seed Saving for Sustainable Agriculture</i>	Petani di desa	Bali	Pengelolaan dan pengolahan sistem pertanian organik pada petani	Sistem Pertanian berkelanjutan berdampak pada kualitas alam.	Pola konsumsi, kebutuhan pangan keluarga, budaya pertanian. Sistem penyimpanan benih.	Memerangi kemiskinan, Pengolahan & pengelolaan penjualan benih.	Pertanian berkelanjutan memberi dampak kesehatan pada alam dan manusia, dan mandiri memenuhi kebutuhan pertanian. Petani menerapkan pertanian berkelanjutan.
PPLH Bali	Sungai bagian kegiatan keseharian	sekolah di kota	Denpasar	Konservasi sungai melalui : film, peta hijau, jurnalistik sosial dan peneliti	pencemaran air dan keanekaragaman di sungai	Situs religi dan kearifan lokal, dan ketersediaan air bersih keseharian	Sungai sebagai bagian dari perekonomian industri kecil	Sungai badung sebagai media belajar untuk masyarakat dan sekolah untuk menjaga kualitas air
JARI	Laut Sahabat kita	Sekolah di Kecamatan	Mataram, Lombok	kegiatan lapangan di pesisir dan laut	Konservasi pesisir dan laut	Pola buang sampah ke laut, aturan lokal menjaga sumberdaya laut	Pariwisata yang bertanggung jawab pada alam	Sekolah terlibat pada program konservasi laut dan pesisir. Orang tua murid dan UPTD terlibat.
Skhola EBG	Peningkatan Kapasitas dengan pembelajaran terpadu	masyarakat dan pendidikan non formal di kecamatan	Kab. Bone	Pembelajaran Bahasa Inggris dalam kelompok	Lingkungan sekitar sebagai media belajar	Bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi dan terbuka untuk hal baru	Bahasa Inggris memudahkan mencari pekerjaan namun biaya kursus mahal	orang tua dan anak-anak menyangi kegiatan komunitas untuk peningkatan kapasitas mereka.
PPLH Puntondo	Perlindungan Terumbu Karang	masyarakat desa	Kab. Takalar	Pendampingan masyarakat	Perbaikan terumbu karang sebagai habitat biota laut	interaksi sosial antar masyarakat di pesisir	mata pencaharian masyarakat adalah nelayan.	Masyarakat memelihara terumbu karang
Suar Institute	Kebun Karet	Masyarakat desa	Nanga Pinoh Melawi	pendampingan masyarakat	Hutan Rasau Sebauh lahan bergambut	Hutan Masyarakat Adat dan Sistem Adat	Alternatif mata pencaharian	Mengurangi ketinggian banjir dengan terjaganya hutan Adat
WWF Indonesia	ESD di jantung Kalimantan	Sekolah	Kalimantan	Pelatihan dan pendampingan sekolah	Pengelolaan Lingkungan, keanekaragaman hayati, dan SDA	Budaya dan Kearifan lokal, konsumtif dan kesenjangan sosial	usaha ramah lingkungan, mata pencaharian nelayan	Pembelajaran yang beragam dan kreatif untuk siswa
YAPEKA	Pengembangan Energi Terbarukan	masyarakat desa	Kab. Waringin Barat	Pemanfaatan kotoran sapi sebagai energi terbarukan	Pemakaian energi terbarukan, manfaat kotoran sapi	alur proses biogas dan pemanfaatan biogas	Peningkatan pendapatan melalui pengurangan belanja rumah tangga	Pengelolaan biogas oleh masyarakat secara mandiri dan pemanfaatan kotoran sapi
Greenna	Daur Ulang	Ibu-ibu	Kampung Cisolopa	pendampingan Ibu-ibu	pengelolaan sampah	menukar sembako dengan sampah, penyelesaian masalah sosial dengan <i>profit attitude system</i>	Membuat produk dengan bahan baku dari sampah	Masyarakat merasakan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pengelolaan sampah

Pendidikan, Edukasi dan Literasi (PEL) untuk Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM: Menengok ke Arah Decade of ESD (2005 – 2013)

Lembaga	Program	Kelompok Sasaran	Lokasi	Proses Pembelajaran	Keseimbangan			
					Ekologi	Sosial	Ekonomi	
KEHATI	Teens go Green	Siswa di kota	Aliran Sungai Ciliwung, Jakarta	Program Siswa	Keterkaitan ekosistem Hulu - kota - Hilir	Gaya hidup ramah Lingkungan	Pola konsumsi meningkatkan volume sampah, sampah berdampak pada ekologi	Program kampanye untuk publik dilakukan oleh siswa
RMI	Pengelolaan daerah Aliran Sungai	Sekolah dan masyarakat	Caringin dan Cigombong,	Penguatan kelompok masyarakat	Kondisi lingkungan hulu DAS berdampak pada wilayah perkotaan	Pengangguran usia produktif, ketahanan dan modal sosial	Pola hidup konsumtif dan potensi ekonomi lokal	Perubahan pola pikir kelompok masyarakat lebih kritis dan kegiatan yang mampu
HIJAU	Sungai sebagai Wisata	Masyarakat di desa	Banjarasri, Jogjakarta	Pendampingan masyarakat mengelola wisata secara bersama	Konsep hulu ke hilir dan debit mata air menurun	Memaknai konsep lokal <i>Hamengyu Hyuning Bawana</i> .	Sungai bagian dari wisata pedesaan yang dikelola masyarakat.	Peningkatan pengelolaan wisata oleh masyarakat secara menyeluruh dan hulu - hilir sungai terjaga.
Kanopi	Konservasi Lereng Gunung Merapi	Petani peternak, sekolah	Kab. Sleman, Lereng Selatan Merapi	Peran kawasan hutan	Pelatihan kepada petani, peternak, sekolah	Minat pada kearifan lokal yang bijak pada alam semakin berkurang	Aktivitas merumput di hutan untuk hewan ternak, <i>social marketing</i>	Alternatif penyediaan makanan ternak berdampak pada perlindungan kawasan hutan
Putra Sampoerna School Outreach	Model Teacher Learning Center	Lumajang	Sekolah dan Masyarakat	Pelatihan Pendidik terkait manajemen sekolah dan pembelajaran	Prinsip, perspektif ESD terkait pendidikan formal dan sehari-hari		Siswa berpikir global dan beraksi lokal yang dihasilkan oleh pendidik yang menerapkan ESD	
ECOTON	Adopsi Kampung Air	Sekolah dan Masyarakat	DAS Brantas, Jawa Timur	Program terkait air	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Mata Air	Interaksi tanggung jawab pengelolaan DAS	Pemandu Ekowisata dan Jalur distribusi kemiri, kopi, dan madu	Pemanfaatan Mata air sebagai tempat wisata, perluasan hutan
PWEC	Konservasi Satwa dan Hutan	Sekolah dan masyarakat kota	Jawa Timur	Program untuk guru, siswa, dan mahasiswa	Satwa liar sebagai perburuan, perdagangan dan pemeliharaan, konservasi hutan	Pemeliharaan satwa liar sebagai gaya hidup, kebanggaan SDA	Satwa dan hutan sebagai aset negara	Isu konservasi dan Satwa tersampaikan pada proses pembelajaran di pendidikan formal
PILI Green Network	Jasa Ekosistem Hutan di TNBBS	Masyarakat	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung	Pendampingan masyarakat	Rehabilitasi lahan dan jasa ekosistem hutan	Perubahan sosial dari tindakan ilegal menjadi legal pada tanaman masyarakat	Diversifikasi mata pencaharian dan usaha ekonomi yang mandiri	Pemulihan paradigma dan tanaman di masyarakat terkait pengelolaan kawasan
YPBB	Bridging Leadership Program	Masyarakat desa	Aceh	Pelatihan kepemimpinan untuk mengelola desa pasca tsunami lebih berkelanjutan	Pembangunan dan daya dukung fisik dan alam	Manajemen isu untuk kesetaraan akses kualitas ekologis	Pola konsumsi/produksi sesuai daya dukung alam	Pemulihan paradigma dan tanaman di masyarakat terkait pengelolaan kawasan
Lembaga Konservasi 21	PLH SD dan SMP	Sekolah	Kab. Lampung Barat	Kebun sekolah, kemah konservasi, lomba	Konservasi hutan sebagai penyedia air	Kebun sekolah dan komunikasi guru - orangtua-murid	Kebun sekolah yang menghasilkan, menunjang kebun kopi orangtua	Kepala sekolah yang mendukung kegiatan, dan mitra lain mempermudah kegiatan

Lampiran 6. Profil Lembaga Anggota Kelompok Kerja LSM untuk ESD di Indonesia

Bima ESW - Benih Matahari

Tahun berdiri : 2000

Alamat : Jl. Bendungan Bening no. 23 65145,
Jawa Timur



Visi

Sebuah proses pendidikan yang berprinsip pada berpikir kritis, terstruktur, logis, kreatif, keberagaman, keterkaitan, interdisiplin, lokal-global, holistik, memahami nilai-nilai, budaya, lingkungan dan berpandangan ke depan:

Deskripsi kegiatan:

Benih Matahari bergerak di bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidik dan berdampak pada pola pikir dan perilaku generasi muda, yang tanggap terhadap perubahan dan berwawasan keberlanjutan.

Cara kerja Kami berdasarkan mitra kerja (*partnership*) dan kerjasama dengan LSM yang berkegiatan dengan sekolah di berbagai daerah.

Kami menerapkan kerangka kerja kombinasi antara pelatihan – lokakarya – pendampingan untuk guru/sekolah/pendidik dimana pendampingan merupakan kunci penting sebagai jaminan bahwa mereka akan tetap menggunakan dan mengembangkan sendiri pengetahuan dan kemampuan baru tersebut.

Petungsewu Wildlife Education Center (P-WEC)

Tahun Berdiri : 2003

Alamat: Jl. Margasatwa No. 1 DS Petungsewu,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang



Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran dan kepedulian akan pelestarian alam

Misi

- Mengembangkan P-WEC sebagai pusat informasi dan pendidikan informal tentang konservasi alam.
- Mengembangkan P-WEC sebagai salah satu alternatif untuk menggalang dana bagi upaya konservasi hutan dan satwa liar yang dilakukan oleh ProFauna Indonesia
- Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, organisasi lainnya dan swasta untuk mendorong adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam

Deskripsi Kegiatan:

Petungsewu Wildlife Education Center (P-WEC, dibaca 'piwec') adalah pusat pendidikan informal tentang konservasi alam yang didirikan oleh ProFauna Indonesia pada akhir tahun 2003. P-WEC didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan wawasan tentang konservasi alam serta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelestarian alam. Kegiatan P-WEC adalah Pendidikan Konservasi, Pengembangan Masyarakat, dan Penggalangan Dana.

Kegiatan Pendidikan Konservasi selain difokuskan di lokasi P-WEC juga dilakukan diluar seperti di lembaga pendidikan formal (sekolah dan universitas) juga dengan kelompok-kelompok non formal. P-WEC juga memiliki program-program regular yang bersifat edukatif seperti seminar, workshop, pelatihan, kampanye dan lain sebagainya.

P-WEC juga melakukan penggalangan dana melalui program-program outdoor education, outbound dan adventure. Pendapatan yang didapatkan adalah untuk menjalankan program-program konservasi satwa liar dan hutan yang dilakukan oleh P-WEC dan ProFauna Indonesia.

PPLH Bali – Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali

Tahun Berdiri : 1997

Alamat Lembaga : Jl. Letda Reta No. 90 Yangbatu, Denpasar
80236, Bali - Indonesia



Visi

“Masyarakat sejahtera dengan pengelolaan lingkungan yang arif dan berkelanjutan”

Misi

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan,
Melakukan praktek nyata pendidikan dan pendampingan masyarakat sesuai dengan kearifan budaya lokal

Menjalin kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat baik swasta maupun pemerintah

Deskripsi Kegiatan :

PPLH Bali adalah lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Program PPLH Bali dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup dengan berbagai aspek yang menyertainya. Hal ini diharapkan dapat sejalan dengan meningkatnya kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan lingkungan.

Area kerja PPLH Bali adalah daerah urban, desa, dan pesisir. Target sasarannya adalah sekolah, peserta didik berbagai usia, komunitas guru, kelompok masyarakat, dan remaja.

Dana yang dikelola oleh PPLH Bali selain berasal dari swadaya lembaga juga berasal dari donator perseorangan maupun lembaga donor dari dalam dan luar negeri. Untuk terlaksananya program dengan baik, PPLH Bali menjalin hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, institusi swasta dan pemerintah.

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo (PPLHP)

Tahun Berdiri : 15 Oktober 2001 (berkegiatan sejak 1998)

Alamat : Jl. Serigala No. 135 Makassar, 90135

www.pplhpuntondo.com (baru)



Visi

Mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup untuk mencapai kehidupan yang harmonis

Misi

1. Menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan independen.
2. Memberi kesempatan belajar kepada kelompok-kelompok dan individu untuk memahami isu-isu lingkungan.
3. Menyebarkan informasi lingkungan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.
4. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup melalui kurikulum pendidikan formal.
5. Menunjukkan contoh kongkrit yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah lingkungan.
6. Mencetak motivator atau individu yang mandiri untuk mengelola lingkungan dan kegiatan mereka.

Deskripsi Kegiatan:

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan lembaga Non Pemerintah yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup Non Formal, yang secara legal berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo (YPLHP).

Lokasi PPLH Puntondo berada di daerah pesisir Teluk Laikang. Area tersebut didesain sedemikian rupa sehingga menjadi tempat media pendidikan lingkungan hidup yang sederhana dan praktis berbasis kelautan dan pesisir.

RMI – Rimbawan Muda Indonesia

Tahun Berdiri : 1992

Alamat Lembaga : Jalan Sempur No. 55 Bogor



Visi

Kedaulatan rakyat perempuan dan laki-laki atas tanah dan kekayaan alam untuk mewujudkan sistem penghidupan berkelanjutan

Misi

1. Memberdayakan kelompok petani, perempuan dan laki-laki dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah dan kekayaan alam untuk penghidupan berkelanjutan.
2. Mengawal proses-proses penyusunan kebijakan menuju kebijakan pengelolaan tanah dan kekayaan alam yang berkeadilan dan menjamin penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin perempuan dan laki-laki.
3. Menggalang aksi kolektif untuk mengakui dan menjamin hak-hak rakyat perempuan dan laki-laki atas tanah dan kekayaan alam.
4. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan melalui proses-prose pembelajaran akseleratif yang mampu melintasi batas-batas antara pengetahuan dan aksi.

Deskripsi Kegiatan:

RMI melakukan aktifitas-aktifitas pendampingan masyarakat, khususnya di kawasan ekosistem Gunung Halimun Salak dan ekosistem Gunung Gede Pangrango di propinsi Jawa Barat dan Banten; dan secara umum di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Aktifitas ini dilakukan melalui pendidikan kritis yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran mereka dalam pengelolaan sumber daya alam untuk penghidupan yang berkelanjutan.

Fakultas Pendidikan

Universitas Siswa Bangsa Internasional

Tahun Berdiri: 2009

Alamat Lembaga: Mulia Business Park. Jl. MT Haryono
Kav 58-60. Jakarta Selatan 12780



Visi

Menjadi sebuah universitas yang berkesinambungan dan diakui secara internasional, sesuai dengan filosofi Putera Sampoerna Foundation dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

Misi

Mendidik calon pemimpin masa depan, sesuai dengan karakteristik yang ingin dibangun oleh Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI) yaitu kepemimpinan, entrepreneurship, bertanggung jawab sosial, dan berkomitmen untuk memberi lebih kepada masyarakat Indonesia melalui keterlibatan bersama Putera Sampoerna Foundation.

Deskripsi Kegiatan:

Fakultas Pendidikan USBI bertujuan menyiapkan generasi baru para pendidik Indonesia yang berkualitas baik dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan guna memenuhi tantangan dan peluang abad ke-21 pendidikan Indonesia. Lulusan USBI tidak hanya akan menjadi siswa yang kompeten dan memenuhi standar akademisi, tetapi mereka juga akan menunjukkan semangat tinggi dalam bidang pendidikan dan berkepribadian terhadap tanggung jawab sosial. Untuk memastikan komitmen ini, Fakultas Ilmu Pendidikan menggunakan kurikulum berstandar internasional dan bekerja sama dengan berbagai mitra penting agar menjadi lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia. Setiap kurikulum program studi dirancang untuk menjadi interdisipliner, *multi-entry*, dan *multi-exit*, fleksibel menyesuaikan berbagai kebutuhan siswa.

Komunitas Skholatanpabatas

Tahun Berdiri : 1991

Alamat Lembaga : Jalan Haji Kalla No. 73 A Kelurahan
Panaikang, Kecamatan Panakkukang Makassar, Sulawesi
Selatan 90231



Visi

Pendidikan untuk semua (*to pada macca*)

Misi

Membangun kemandirian, penguatan diri yang bernuansa lokalitas, pengembangan diri yang humanis.

Deskripsi Kegiatan

Skholatanpabatas merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang pemberdayaan pemuda dalam bidang pendidikan, Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan hidup, memberi kesempatan kepada pemuda/pemudi untuk terlibat aktif dalam berbagi (mengajar) pada lokasi dampingan Skholatanpabatas. Lokasi berbagi terdapat di beberapa dampingan Skholatanpabatas, berupa komunitas, panti asuhan, dan sekolah. Komunitas dampingan berada di perkotaan urban (Makassar dan Kendari), pesisir (Makassar dan Pinrang), pegunungan (Lapri, Bone). Panti asuhan berada di kota Makassar dan Manado. Sekolah dampingan berada di Maros dan Makassar. Sasaran dari kegiatan di lokasi dampingan ini adalah masyarakat dan anak-anak usia sekolah. Beberapa materi berbagi (ajar) di lokasi dampingan adalah kesenian (tari), bahasa Inggris, menulis dan membaca, kerajinan tangan, lingkungan hidup, dan pengembangan diri. Penyampaian materi merupakan integrasi ke dalam nilai-nilai lokalitas. Program yang lain adalah melakukan pelatihan dan pendampingan dengan pihak lain dalam bentuk kegiatan bersama maupun melibatkan Skholatanpabatas dalam kegiatan internal sekolah maupun dampingan.

Yayasan WWF Indonesia

Tahun Berdiri : 1962

Alamat: Graha Simatupang, Tower 2 Unit C, 7th – 11 th Floor.
Jl. Letjen T.B. Simatupang, Jakarta - 12540

www.wwf.or.id



Visi

Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa mendatang

Misi

- Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi di kalangan masyarakat Indonesia.
- Memfasilitasi upaya multi pihak untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologis dalam skala ekoregional.
- Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung upaya pelestarian.
- Mempromosikan pelestarian bagi kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Deskripsi Kegiatan

WWF Indonesia merupakan organisasi konservasi alam terbesar di Indonesia dan telah memulai kegiatannya sejak tahun 1962. Telah berbadan hukum Yayasan sejak tahun 1998, saat ini, WWF-Indonesia bekerja di 28 kantor wilayah dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh lebih dari 400 karyawan. Sejak tahun 2006, WWF Indonesia mendapatkan dukungan lebih dari 54,000 supporter yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

**Women and Youth Development Institute of Indonesia
(WYDII)**

Surabaya-Jawa Timur.



Visi

WYDII bertujuan terciptanya keterwakilan dan partisipasi aktif semua golongan dalam proses pengambilan keputusan, demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berperikemanusiaan

Misi

1. Mendorong terbangunnya konsep kepemimpinan partisipatoris di kalangan muda dan perempuan.
2. Menciptakan lebih banyak ruang-ruang komunikasi formal yang bermuara gender antara perempuan dan kalangan muda yang secara berangsur-angsur dapat mempengaruhi proses re-konspetualisasi gender di antara keduanya.
3. Meningkatkan kapabilitas dan potensi perempuan dan kalangan muda yang berbasis gender agar dapat berpartisipasi dengan lebih aktif dalam demokrasi dan pembangunan.
4. Terus aktif terlibat merawat kelangsungan lingkungan dan yang nantinya dapat menginspirasi kalangan yang lebih luas dengan gagasan-gagasan penyelamatan lingkungan.

WYDII melakukan pemberdayaan masyarakat melalui:

1. Mengupayakan terciptanya kesetaraan gender diberbagai bidang sosial, budaya, dan politik.
2. Advokasi kepemimpinan dan politik perempuan bagi perempuan dan remaja putri melalui pelatihan.
3. Advokasi pernikahan dibawah umur dikalangan remaja.
4. Advokasi memperjuangkan keadilan yang disebabkan karena dampak-dampak eksploitasi sumber-sumber daya alam dengan mengembangkan kewajiban merawat dan peduli terhadap lingkungan.
5. Menumbuhkan kader perempuan menjadi aktor sosial yang mampu melakukan advokasi pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal kesehatan, pangan, energi, dan partisipasi di ruang publik.
6. Mengembangkan pendidikan dan membangun kesadaran perempuan terhadap perumusan kebijakan dan pembentukan norma- perempuan atas nama agama.

Yayasan Hijau GPL

Tahun Berdiri : 1999

Alamat lembaga : Jl Amri Yahya No.1 Gampingan
(komplek Jogja National Museum), Wirobrajan,
Kota Jogjakarta 55253, DIY



Visi dan Misi

Tercapainya tatanan masyarakat yang ramah lingkungan selaras dengan kearifan budaya lokal

Deskripsi Kegiatan:

Mengembangkan kerja-kerja kegiatan penyadartahuan dan pendidikan lingkungan hidup dengan menaburkan benih-benih kesadaran akan cinta terhadap lingkungan bersama anak usia sekolah dasar, guru, dan keluarga melalui media seni dan budaya.

Yayasan Kehati

Tahun berdiri : 1994

Alamat: Jl. Bangka VIII No. 3B Pela Mampang,
Jakarta Selatan 12720

www.kehati.or.id



Visi

“Menjadi agen perubahan terpercaya dan berpengaruh dalam mendukung pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan”

Misi

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
- Penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumberdaya.
- Pemberdayaan lembaga masyarakat.
- Pemberian dukungan kepada pertumbuhan gerakan ekonomi berbasis sumberdaya alam terbarukan.
- Mendorong terciptanya kebijakan public di tingkat lokal dan nasional untuk pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Yayasan BioCommunica

Puri Cipageran Indah II C5-1

Bandung Barat 40552

Phone : +62 22 86600544

Mobile : +62 85794111963

Email: salehmochamad@gmail.com



Aktivitas:

Pelatihan, Fasilitasi dan Pendampingan kegiatan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Perjalanan
Education for Sustainable Development di Indonesia
dalam Perspektif LSM
Menyongsong akhir Decade of ESD (2005 – 2014)

